



DINAMIKA

DAN KEBIJAKAN

PENDIDIKAN

Penulis:

Dian Fithra Permana | Randitha Missouri | Sri Intan Wahyuni
Sugiarto | Muryadi | Melati Indri Hapsari
Andarusni Alfansyur | Nofel Windo | Muta'alimah
Hisn bin Abdul Halim



DINAMIKA DAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN

**Dian Fithra Permana
Randitha Missouri
Sri Intan Wahyuni
Sugiarto
Muryadi
Melati Indri Hapsari
Andarusni Alfansyur
Nofel Windo
Muta'alimah
Hisan bin Abdul Halim**

**Editor :
Prof. Dr. Eko Handoyo, M. Si.
Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum.**

DINAMIKA DAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN

Tim Penulis:

Dian Fithra Permana
Randitha Missouri
Sri Intan Wahyuni
Sugiarto
Muryadi
Melati Indri Hapsari
Andarusni Alfansyur
Nofel Windo
Muta'alimah
Hisan bin Abdul Halim

Editor : Prof. Dr. Eko Handoyo, M. Si.
Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum.
Tata Letak : Lilis Khalisatul Karimah
Desain Cover : Asep Nugraha
Ukuran : UNESCO 15,5 x 23 cm
Halaman : viii, 185
ISBN : 978-634-7522-54-2
Terbit Pada : Mei 2026
Anggota IKAPI : No. 073/BANTEN/2023

Hak Cipta 2026 @ Sada Kurnia Pustaka dan Penulis

Hak cipta dilindungi undang-undang dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit dan penulis.

PENERBIT PT SADA KURNIA PUSTAKA

Jl. Kramat, Panenjoan Kec. Carenang, Kab. Serang – Banten, 42195
Email : sadapenerbit@gmail.com
Website : sadapenerbit.com & repository.sadapenerbit.com
Telpon/WA : +62 838 1281 8431

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, buku yang berjudul "**Dinamika dan Kebijakan Pendidikan**" ini dapat diselesaikan dengan baik. Buku ini hadir sebagai upaya untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai perubahan, tantangan, serta arah kebijakan pendidikan di tengah arus globalisasi dan perkembangan zaman yang semakin dinamis.

Pendidikan merupakan fondasi utama dalam membangun peradaban suatu bangsa. Namun, dalam perjalanannya, sistem pendidikan terus mengalami perubahan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti perkembangan teknologi, sosial budaya, ekonomi, dan politik. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai dinamika yang terjadi serta kebijakan yang diambil oleh pemerintah menjadi hal yang krusial bagi para pendidik, mahasiswa, praktisi pendidikan, dan pemangku kebijakan.

Dalam buku ini, kami mengupas berbagai topik penting mulai dari konsep dasar dinamika pendidikan, hubungan antara kebijakan pendidikan dengan perubahan sosial, hingga analisis terhadap kebijakan pendidikan nasional dari masa ke masa. Selain itu, dibahas pula isu-isu kontemporer dalam pendidikan seperti digitalisasi pembelajaran, pemerataan akses, dan peningkatan mutu guru, serta tantangan implementasi kebijakan di daerah beserta strategi adaptasi terhadap perubahan.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam proses penulisan dan penerbitan buku ini, terutama kepada para akademisi, peneliti, serta rekan-rekan sejawat yang telah memberikan masukan berharga.

Akhir kata, semoga buku ini dapat memberikan manfaat dan menjadi referensi yang berguna bagi siapa saja yang ingin mendalami dinamika dan kebijakan pendidikan. Semoga ilmu yang terkandung di dalamnya dapat menginspirasi perubahan positif bagi dunia pendidikan di Indonesia. **Selamat bertransformasi!**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB 1 KEBIJAKAN PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DI INDONESIA.....	1
(Dian Fithra Permana)	
Pendahuluan	2
Standar Nasional Pendidikan (SNP) sebagai Landasan Kualitas Pendidikan	3
Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP) dan SPMI.....	6
Akreditasi sebagai Instrumen Kebijakan Mutu	8
Peran Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Mutu Pendidikan ...	9
Tantangan Implementasi Kebijakan Mutu Pendidikan	11
Strategi Peningkatan Mutu Pendidikan ke Depan	13
Daftar Pustaka	16
Profil Penulis	18
BAB 2 DAMPAK GLOBALISASI TERHADAP REFORMASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN DI INDONESIA	19
(Randitha Missouri)	
Globalisasi dan Transformasi Kebijakan Pendidikan: Kerangka Konseptual dan Teoretik.....	20
Globalisasi sebagai Relasi Kuasa: Perspektif Postkolonial dan Kedaulatan Epistemik.....	23
Genealogi Reformasi Kebijakan Pendidikan Indonesia dalam Arus Globalisasi	27
Tekanan Global dan Perubahan Substansi Kebijakan Pendidikan	30
Globalisasi dan Transformasi Tata Kelola Pendidikan Nasional.....	33
Menuju Kedaulatan Kebijakan Pendidikan Indonesia di Era Global.....	35
Daftar Pustaka	38
Profil Penulis	52

BAB 3 KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KURIKULUM PADA ERA GLOBAL	53
(Sri Intan Wahyuni)	
Pendahuluan	54
Dinamika Kebijakan Pengembangan Kurikulum di Indonesia	56
Landasan Teoretis Perkembangan Kurikulum di Indonesia	58
Tantangan Global dan Respons Kebijakan Nasional.....	61
Analisis Empiris Implementasi Kebijakan.....	62
Analisis Komparatif dengan Negara Lain.....	64
Sintesis dan Implikasi Kebijakan.....	66
Transformasi Kurikulum Berbasis Digital dan Society 5.0.....	68
Penguatan Tata Kelola Kurikulum Berbasis <i>Evidence-Based Policy</i>	69
Integrasi Kurikulum Berbasis <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs).....	70
Kebutuhan Mendesak Kurikulum Adaptif di Era Disrupsi	71
Kesimpulan	72
Daftar Pustaka.....	74
Profil Penulis.....	77
BAB 4 SEJARAH KEBIJAKAN PENDIDIKAN PADA ERA ORDE LAMA, ORDE BARU DAN REFORMASI	78
(Sugiarto)	
Pendahuluan	79
Kebijakan Pendidikan pada Era Orde Lama	80
Kebijakan Pendidikan pada Era Orde Baru.....	81
Kebijakan Pendidikan pada Era Reformasi.....	82
Kesimpulan.....	84
Daftar Pustaka.....	86
Profil Penulis.....	88
BAB 5 RUMUSAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KUALITAS DAN KOMPETENSI GURU DI INDONESIA	89
(Muryadi)	
Pendahuluan	90
Guru, Mutu Pendidikan, dan Tantangan Kebijakan Di Indonesia	90

Kualitas Guru, Kompetensi Guru, dan Pengembangan Profesional	92
Potret Kebijakan Pengembangan Guru di Indonesia.....	93
Kritik Atas Model Kebijakan Guru yang Dominan	94
Model Arsitektur Kebijakan 3E-1D	95
Rumusan Kebijakan Strategis Pengembangan Guru di Indonesia	96
Menuju Indonesia Emas 2045 dengan Guru Berkualitas	97
Daftar Pustaka.....	99
Profil Penulis.....	100
BAB 6 IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DASAR DI INDONESIA.....	102
(Melati Indri Hapsari)	
Pendahuluan	103
Konsep Kebijakan Pendidikan.....	104
Pendidikan Dasar dalam Sistem Pendidikan Nasional	105
Kebijakan Pengembangan Pendidikan Dasar	106
Implementasi Kebijakan Pendidikan Dasar.....	107
Evaluasi dan Tantangan Implementasi	110
Kesimpulan dan Rekomendasi.....	111
Daftar Pustaka.....	112
Profil Penulis.....	113
BAB 7 KOHESI KEBIJAKAN DALAM REFORMASI PENDIDIKAN MENENGAH INDONESIA (2003–2025).....	114
(Andarusni Alfansyur)	
Pendahuluan	115
Evolusi Reformasi Pendidikan Menengah dan Dinamika Rezim Kebijakan (2003–2025).....	116
<i>Policy Coherence</i> : Dimensi Temporal, Vertikal, dan Horizontal.....	124
Keselarasan Instrumen Kebijakan: Kurikulum, Pembiayaan, Penilaian, dan Tata Kelola	125
Penutup	128
Daftar Pustaka.....	130
Profil Penulis.....	132

BAB 8 IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN VOKASI DAN REVITALISASI SMK DI INDONESIA.....	133
(Nofel Windo)	
Urgensi Strategis Pendidikan Vokasi	134
Arah dan Desain Kebijakan Vokasi.....	135
Perspektif Teoritis Implementasi	137
Dinamika TPT dan Transisi Pasar Kerja.....	138
Strategi Penguatan Kebijakan.....	143
Sintesis dan Implikasi.....	146
Daftar Pustaka.....	147
Profil Penulis.....	149
BAB 9 IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN NON FORMAL DI INDONESIA	150
(Muta'alimah)	
Pendahuluan	151
Pengertian dan Eksistensi Pendidikan Nonformal.....	152
Jenis dan Implementasi Kebijakan Pendidikan Nonformal....	154
Kesimpulan.....	163
Daftar Pustaka.....	165
Profil Penulis.....	167
BAB 10 EVALUASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN YANG RAMAH ANAK, RESPONSIF GENDER, DAN INKLUSIF DISABILITAS DI INDONESIA	169
(Hisan bin Abdul Halim)	
Pengertian Kebijakan Pendidikan Ramah Anak, Perempuan dan Disabilitas.....	170
Ruang Lingkup Kebijakan Pendidikan Inklusif	170
Landasan Filosofis dan Teoretis Kebijakan Pendidikan Inklusif	171
Dinamika Implementasi Kebijakan di Indonesia.....	172
Evaluasi Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif dan Model Evaluasi 3S-E	173
Implikasi Kebijakan Pendidikan Ramah Anak, Perempuan, dan Disabilitas di Indonesia.....	175
Sintesis Rekomendasi Strategis dan Penegasan Paradigma Kebijakan	178

Kesimpulan	181
Daftar Pustaka.....	183
Profil Penulis.....	185



BAB 1

KEBIJAKAN

PENINGKATAN MUTU

PENDIDIKAN DI

INDONESIA

Dian Fithra Permana, S.Pd., M.Pd.
Universitas Negeri Semarang



Pendahuluan

Pendidikan merupakan fondasi utama dalam pembangunan sumber daya manusia yang kompetitif dan berdaya saing di era globalisasi. Di Indonesia, mutu pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab lembaga pendidikan itu sendiri, tetapi juga menjadi arah kebijakan pemerintah yang terencana untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, pemerataan akses, serta keluaran pendidikan yang memenuhi standar nasional dan internasional (Permana & Nur Ilham, 2023; Ali & Hermansyah, 2024). Sebagai negara kepulauan dengan kondisi sosial-budaya yang beragam, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam pemerataan mutu pendidikan di berbagai jenjang. Ketimpangan kualitas antara wilayah perkotaan dan perdesaan, keterbatasan fasilitas pendidikan, serta beragam kompetensi pendidik menjadi isu strategis yang memerlukan pemikiran kebijakan berbasis bukti dan berkelanjutan (Gusti & Masduki, 2022; Syaifullah et al., 2021).

Untuk itu, pemerintah Indonesia menetapkan kerangka kebijakan pendidikan melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menjadi dasar hukum bagi penyelenggaraan pendidikan nasional. Undang-undang ini kemudian dijabarkan ke dalam Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang mencakup delapan aspek kritis mutu pendidikan, termasuk Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, Standar Proses, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, serta Standar Penilaian. SNP berfungsi sebagai tolok ukur dan pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pendidikan di semua jenjang (Kementerian Pendidikan Nasional, 2003; Syaifullah et al., 2021). Sebagai instrumen operasional, Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP) diimplementasikan untuk menjamin pemenuhan dan peningkatan mutu pendidikan secara sistematis dan berkelanjutan. SPMP diatur melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009, yang menegaskan perlunya kegiatan monitoring, evaluasi, dan perbaikan berkelanjutan di setiap satuan pendidikan agar SNP benar-benar tercapai dalam praktik pembelajaran sehari-hari (Permana & Nur Ilham, 2023). Selain kebijakan nasional di bidang SNP

dan SPMP, akreditasi sekolah dan program pendidikan merupakan mekanisme penjaminan mutu eksternal yang penting. Akreditasi dilakukan oleh lembaga independen untuk menilai apakah suatu lembaga pendidikan memenuhi standar kualitas tertentu, serta mendorong perbaikan kinerja pendidikan berdasarkan hasil penilaian tersebut (Ali & Hermansyah, 2024).

Peran pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga menjadi kunci dalam penguatan mutu pendidikan di Indonesia. Pemerintah pusat bertanggung jawab dalam penyusunan kebijakan strategis, sementara pemerintah daerah memiliki peran dalam implementasi kebijakan di tingkat lokal, termasuk alokasi sumber daya dan penyesuaian program pendidikan dengan kebutuhan masyarakat setempat (Gusti & Masduki, 2022). Di samping itu, inovasi teknologi pembelajaran semakin penting dalam menghadapi tuntutan abad 21. Kebijakan pemerintah mendorong integrasi teknologi digital dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan efektivitas, relevansi, dan keterlibatan peserta didik dalam proses belajar mengajar (Permana & Nur Ilham, 2023).

Dengan berbagai kebijakan dan mekanisme penjaminan mutu yang telah disusun dan diimplementasikan, evaluasi terhadap efektivitas kebijakan mutu pendidikan menjadi penting agar dapat menghasilkan peningkatan kualitas pembelajaran, pemerataan akses, dan penguatan kompetensi lulusan yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja serta perkembangan ilmu pengetahuan (Syaifullah et al., 2021). Oleh karena itu, tulisan ini akan mengulas secara komprehensif kebijakan peningkatan mutu pendidikan di Indonesia, termasuk kerangka regulasi, pelaksanaan strategi, tantangan yang dihadapi, serta arah kebijakan ke depan dalam membangun sistem pendidikan nasional yang berkualitas dan berkelanjutan.

Standar Nasional Pendidikan (SNP) sebagai Landasan Kualitas Pendidikan

Standar Nasional Pendidikan (SNP) merupakan kerangka kebijakan strategis yang berfungsi sebagai acuan utama dalam menjamin, mengendalikan, dan meningkatkan mutu pendidikan secara nasional

Daftar Pustaka

- Ali, A. I., & Hermansyah, E. (2024). Quality assurance system policy in education: A comparative study between Indonesia and Finland. *Jurnal Penelitian Kebijakan Pendidikan*.
- Boell, S. K., & Cecez-Kecmanovic, D. (2014). Literature reviews and the hermeneutic circle. *SAGE Publications*.
- Gusti, G., & Masduki. (2022). Regulasi penjaminan mutu pendidikan di Indonesia. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan Sains*, 11(1).
- Hart, C. (1998). Doing a literature review: Releasing the social science research imagination. *SAGE Publications*.
- Indana, N., Mustofa, A., Qomar, M., Aziz, A., & Junaris, I. (2022). Government policy in strengthening education quality assurance in Islamic education institutions. *QALAMUNA: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Agama*.
- Ishak, D. (2022). Implementation of education quality assurance policy: Between expectations and reality. *Jurnal Pendidikan Indonesia*.
- Karwono, H., & Susetyo, B. (2020). Peta mutu satuan pendidikan di Indonesia berdasarkan akreditasi tahun 2020. *Jurnal Penelitian Kebijakan Pendidikan*.
- Kementerian Pendidikan Nasional. (2003). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kemendiknas.
- Okoli, C., & Schabram, K. (2010). A guide to conducting a systematic literature review of information systems research. *Social Science Research Network*.
- Permana, M. A. A., & Nur Ilham, M. A. (2023). *Peningkatan mutu pendidikan di Indonesia melalui kebijakan dan inovasi teknologi*. Sindoro: Cendikia Pendidikan.
- Rahman, T., Wasliman, I., Muttaqien, K., & Sauri, R. S. (2019). Accreditation policies implementation to improve performance quality in madrasah. *International Journal of Educational Review*.
- Safitri, Y., & Julaiha, S. (2025). Implementasi standar nasional pendidikan dalam meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah.

Andragogi: *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*.

- Sulaiman, A., & Wibowo, U. B. (2016). Implementasi sistem penjaminan mutu internal sebagai upaya peningkatan mutu pendidikan. *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan*, 4(2), 193–205.
- Syaifullah, A., et al. (2021). Evaluasi kebijakan dalam peningkatan mutu pendidikan di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 1(2), 46–57.
- Tranfield, D., Denyer, D., & Smart, P. (2003). Towards a methodology for developing evidence-informed management knowledge by means of systematic review. *British Journal of Management*, 14(3), 207–222.
- Webster, J., & Watson, R. T. (2002). Analyzing the past to prepare for the future: Writing a literature review. *MIS Quarterly*, 26(2), xiii–xxiii.

PROFIL PENULIS




Dian Fithra Permana, S.Pd., M.Pd.

Ketertarikan penulis terhadap bidang pendidikan dan administrasi perkantoran mulai berkembang sejak menempuh pendidikan tinggi. Hal tersebut mendorong penulis untuk melanjutkan studi pada jenjang Sarjana (S1) di Program Studi Pendidikan Administrasi Perkantoran Universitas Negeri Yogyakarta dan berhasil lulus pada tahun 2013. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan ke jenjang Magister (S2) pada Program Studi Manajemen Pendidikan di universitas yang sama dan berhasil menyelesaikan studi pada tahun 2019.

Penulis saat ini berkariir sebagai dosen di Universitas Negeri Semarang dengan jabatan akademik Lektor. Penulis memiliki kepakaran di bidang manajemen pendidikan, administrasi perkantoran, serta pengelolaan arsip digital. Dalam rangka mewujudkan karir sebagai dosen profesional, penulis aktif melaksanakan berbagai kegiatan tridharma perguruan tinggi, khususnya dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Berbagai penelitian yang telah dilakukan penulis berfokus pada pengembangan sistem arsip digital, pembelajaran berbasis teknologi, serta peningkatan kompetensi administrasi dan manajerial, yang didanai oleh internal perguruan tinggi.

Selain aktif sebagai peneliti, penulis juga terlibat dalam publikasi ilmiah dalam bentuk jurnal maupun kegiatan seminar nasional dan internasional. Penulis juga aktif dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui pelatihan, sosialisasi, dan pendampingan di bidang administrasi perkantoran dan pendidikan. Dengan pengalaman tersebut, penulis berharap dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan serta peningkatan kualitas pendidikan Indonesia.

Email Penulis: dianfithrapermana@mail.unnes.ac.id



BAB 2

**DAMPAK GLOBALISASI
TERHADAP REFORMASI
KEBIJAKAN PENDIDIKAN
DI INDONESIA**

Randitha Missouri, M.Pd.
Universitas Muhammadiyah Bima



Globalisasi dan Transformasi Kebijakan Pendidikan: Kerangka Konseptual dan Teoretik

Globalisasi dipahami sebagai proses multidimensional yang mencakup dimensi ekonomi, politik, dan ideologis yang secara simultan membentuk arah kebijakan pendidikan kontemporer. Globalisasi mendorong pembaruan kebijakan pendidikan dengan mengadopsi standar global, memperpanjang siklus pendidikan, dan mengintegrasikan pendidikan vokasi, meskipun tantangan ketimpangan akses masih terjadi terutama di negara berpenghasilan rendah (Angana et al., 2025; Widaningsih & Rahman, 2023). Dalam dimensi ekonomi, globalisasi mendorong sistem pendidikan menghasilkan sumber daya manusia yang kompetitif, adaptif, dan mampu berpartisipasi dalam ekonomi berbasis pengetahuan. Dalam dimensi politik, pendidikan semakin berada dalam kerangka *global governance*, di mana organisasi internasional, jaringan kebijakan, dan komunitas epistemik memengaruhi agenda, standar, dan prioritas pendidikan nasional. Sementara itu, dalam dimensi ideologis, globalisasi menyebarkan nilai dan paradigma seperti efisiensi, akuntabilitas, standarisasi, dan orientasi kinerja yang membentuk cara negara memahami tujuan dan fungsi pendidikan.

Kebijakan pendidikan yang responsif terhadap globalisasi menuntut manajemen partisipatif dan hubungan global yang kuat, serta penghindaran dari manajemen tradisional yang introspektif (Mohammad, 2025). Selain itu, globalisasi juga menuntut pemimpin pendidikan untuk mengadopsi perspektif global, memanfaatkan teknologi digital, dan mempromosikan tanggung jawab sosial guna mencapai keseimbangan antara kualitas dan kesetaraan pendidikan (Farhat Nasir et al., 2025; Jin, 2023). Kerjasama internasional menjadi penting dalam berbagi praktik terbaik dan sumber daya untuk mengatasi tantangan bersama serta memperkuat kebijakan pendidikan nasional (Blagorazumnaia & Trifonova, 2023). Dengan demikian, pendidikan tidak lagi semata urusan domestik, tetapi menjadi bagian dari tatanan global yang kompleks dan saling terhubung. Namun, adaptasi kebijakan harus mempertimbangkan konteks lokal agar relevan dan efektif dalam menghadapi dinamika sosial, ekonomi, dan budaya yang berbeda antarnegara (Lastimoso et al., 2025).

Teori *policy borrowing and lending* dari David Phillips menegaskan bahwa adopsi kebijakan antarnegara terjadi melalui proses seleksi, adaptasi, dan reinterpretasi sesuai konteks lokal, bukan sekadar penyalinan langsung. Penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti keterikatan negara dengan organisasi internasional, kapasitas implementasi kebijakan, dan konteks politik-ekonomi sangat memengaruhi waktu dan cara adopsi kebijakan tersebut (Döme, 2024; Ulybina, 2022). Selain itu, difusi kebijakan sering terjadi melalui emulasi normatif dan pembelajaran sosial antarnegara yang memiliki kesamaan ekonomi atau geografis (Mohammad et al., 2022). Studi kasus pada berbagai kebijakan seperti pajak minuman manis dan kebijakan energi terbarukan juga mengindikasikan adanya adaptasi lokal yang mempertimbangkan kondisi ekonomi dan sosial masing-masing negara (Falcone, 2023; Mulcahy et al., 2022). Adopsi awal kebijakan internasional sering didorong oleh motivasi normatif, reputasi, persaingan, dan penguncian kebijakan yang kemudian memicu difusi lebih luas (Higham, 2026). Dengan demikian, proses adopsi kebijakan antarnegara adalah dinamis dan kontekstual, bukan mekanisme penyalinan pasif.

Perspektif *global policy sociology* dari Stephen J. Ball memperluas analisis dengan melihat kebijakan tidak hanya sebagai dokumen atau teks, tetapi juga sebagai wacana yang dipengaruhi oleh neoliberalisme dan dinamika pasar global, seperti dalam kasus internasionalisasi pendidikan publik di Kanada yang menempatkan pendidikan sebagai komoditas internasional (Elnagar, 2021). Ball juga mengembangkan konsep siklus kebijakan yang membantu memahami bagaimana kebijakan inklusi pendidikan di Maroko dipengaruhi oleh konteks historis, sosial, dan politik lokal serta global ("*Bibliography of Abstracts of English Language theses on Morocco, 2023 and 2024,*" 2025). Selain itu, perspektifnya mengkritisi tekanan performativitas dalam dunia pendidikan yang dapat membatasi agen profesional guru, meskipun tetap memberikan kerangka untuk memahami pengaruh kebijakan global terhadap praktik lokal (Goodley & Perryman, 2022). Konsep *policy trajectory* yang dikembangkan berdasarkan pemikiran Ball juga memperlihatkan bagaimana kebijakan mengalami

Daftar Pustaka

- Abimbola, S., van de Kamp, J., Lariat, J., Rathod, L., Klipstein-Grobusch, K., van der Graaf, R., & Bhakuni, H. (2024). Unfair knowledge practices in global health: A realist synthesis. *Health Policy and Planning*, 39(6), 636–650. <https://doi.org/10.1093/heapol/czae030>
- Alestriani Sibagariang, S. (2025). Curriculum reform amid Indonesia's educational decentralization: Policy, practice, and outcomes. *Journal of Hunan University Natural Sciences*, 52(5). <https://doi.org/10.55463/issn.1674-2974.52.5.11>
- Amorós Molina, Á., Helldén, D., Alfvén, T., Niemi, M., Leander, K., Nordenstedt, H., Rehn, C., Ndejjo, R., Wanyenze, R., & Biermann, O. (2023). Integrating the United Nations sustainable development goals into higher education globally: A scoping review. *Global Health Action*, 16(1). <https://doi.org/10.1080/16549716.2023.2190649>
- Angana, M., Orge, L., & Galigao, R. (2025). Globalizing education: Impacts on policies, systems, access, and outcomes across nations. *Pantao (International Journal of the Humanities and Social Sciences)*. <https://doi.org/10.69651/PIJHSS040103>
- Aydinli, E., & Aydinli, J. (2024). Exposing linguistic imperialism: Why global IR has to be multilingual. *Review of International Studies*, 50(6), 943–964. <https://doi.org/10.1017/S0260210523000700>
- Bafon, J. N. (2025). Beyond decoloniality of educational policy and planning: A review of the transcendental political economy of African higher education in the 21st knowledge-based societies. *Perspectives in Education*, 43(3), 3–22. <https://doi.org/10.38140/pie.v43i3.7900>
- Baharuddin, & Burhan. (2025). Urban and rural teacher perspectives on Indonesian educational reform: Challenges and policy implications. *Cogent Education*, 12(1). <https://doi.org/10.1080/2331186X.2025.2497142>
- Bedoll, D., van Zanten, M., & McKinley, D. (2021). Global trends in medical education accreditation. *Human Resources for Health*,

- 19(1), 70. <https://doi.org/10.1186/s12960-021-00588-x>
- Beidollahkhani, A. (2025). Policy-mediated epistemic control: How authoritarian regimes repurpose graduate political science research agenda—The case of Islamic Republic of Iran. *Higher Education Policy*. <https://doi.org/10.1057/s41307-025-00413-3>
- Bibliography of Abstracts of English Language theses on Morocco, 2023 and 2024. (2025). *The Maghreb Review*, 50(2), 218–230. <https://doi.org/10.1353/tmr.2025.a964302>
- Blagorazumnaia, O., & Trifonova, L. (2023). Educational policy in the context of globalization and international cooperation. *Journal of Research on Trade, Management and Economic Development*, 10(1), 134–145. <https://doi.org/10.59642/JRTMED.1.2023.10>
- Bousquet, M., Byrne, A., Forget, D., Gough, G., Rheault, L.-R., Roche, S., & Siaussat, D. (2025). National context impacts on SDG mapping needs and approaches in higher education, a tri-national comparison. *Sustainability*, 17(14), 6506. <https://doi.org/10.3390/su17146506>
- Brauer, S., Kettunen, J., Levy, A., Merenmies, J., & Kulmala, P. (2023). The educational paradigm shift—a phenomenographic study of medical teachers' experiences of practices. *BMC Medical Education*, 23(1), 29. <https://doi.org/10.1186/s12909-023-04013-w>
- Castro Torres, A. F., & Alburez-Gutierrez, D. (2022). North and South: Naming practices and the hidden dimension of global disparities in knowledge production. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 119(10). <https://doi.org/10.1073/pnas.2119373119>
- Cruz-Hidalgo, E., Medina-Miltimore, S., & Mario, A. (2025). Currencies come and go, but employment always takes root: Rethinking external constraints and monetary sovereignty in the periphery. *Economies*, 13(1), 9. <https://doi.org/10.3390/economies13010009>
- Deuel, R. P. (2022). Governing higher education toward neoliberal governmentality: A Foucauldian discourse analysis of global policy agendas. *Globalisation, Societies and Education*, 20(3), 310–323.

<https://doi.org/10.1080/14767724.2021.1897000>

- Do, T. T. (2022). Vietnam's emergence as a middle power in Asia: Unfolding the power-knowledge nexus. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 41(2), 279–302. <https://doi.org/10.1177/18681034221081146>
- Döme, V. (2024). A global-scale study on decision making in renewable energy policy: Internal and external factors driving the adoption of Feed-in Tariffs and Renewable Portfolio Standards. *Environmental Policy and Governance*, 34(3), 321–335. <https://doi.org/10.1002/eet.2085>
- Edwards, D. B., Caravaca, A., Rappeport, A., & Sperduti, V. R. (2024). World Bank influence on policy formation in education: A systematic review of the literature. *Review of Educational Research*, 94(4), 584–622. <https://doi.org/10.3102/00346543231194725>
- Elfert, M. (2021). The power struggle over education in developing countries: The case of the UNESCO-World Bank Co-operative program, 1964-1989. *International Journal of Educational Development*, 81, 102336. <https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2020.102336>
- Elnagar, A. (2021). Internationalization policies of public schooling and neoliberal discourses: A Stephen Ball informed analysis. *Comparative and International Education*, 50(1). <https://doi.org/10.5206/cieeci.v50i1.11075>
- Erkkilä, T. (2023). Global indicators and AI policy: Metrics, policy scripts, and narratives. *Review of Policy Research*, 40(5), 811–839. <https://doi.org/10.1111/ropr.12556>
- Esguerra, A. (2024). Objects of expertise. The socio-material politics of expert knowledge in global governance. *Global Studies Quarterly*, 4(3). <https://doi.org/10.1093/isagsq/ksae060>
- Fahrudiana, Y. (2025). Education at the cultural crossroads: Navigating identity and globalization in Southeast Asia. *International Education Trend Issues*, 3(1), 33–38. <https://doi.org/10.56442/ieti.v3i1.1055>

- Falcone, P. M. (2023). Sustainable energy policies in developing countries: A review of challenges and opportunities. *Energies*, 16(18), 6682. <https://doi.org/10.3390/en16186682>
- Farhat Nasir, Bhatti, A. H., Zubair, M., Sarfaraz, M., & Miran, G. (2025). Globalization impact on 21st century educational leadership: Challenges and adaptation in Pakistan. *The Critical Review of Social Sciences Studies*, 3(1), 830–844. <https://doi.org/10.59075/pdnkez10>
- Gandomkar, R., Changiz, T., Omid, A., Alizadeh, M., Khazaei, M., Heidarzadah, A., Rouzrokh, P., Amini, M., Honarpisheh, H., Laripour, R., Abedi, F., Sabet, B., & Mirzazadeh, A. (2023). Developing and validating a national set of standards for undergraduate medical education using the WFME framework: The experience of an accreditation system in Iran. *BMC Medical Education*, 23(1), 379. <https://doi.org/10.1186/s12909-023-04343-9>
- Gebremariam, E. B. (2025). Decentering coloniality: Epistemic justice, development studies and structural transformation. *The European Journal of Development Research*, 37(2), 442–453. <https://doi.org/10.1057/s41287-024-00681-6>
- Giles-Corti, B., Moudon, A. V., Lowe, M., Cerin, E., Boeing, G., Frumkin, H., Salvo, D., Foster, S., Kleeman, A., Bekessy, S., de Sá, T. H., Nieuwenhuijsen, M., Higgs, C., Hinckson, E., Adlakha, D., Arundel, J., Liu, S., Oyeyemi, A. L., Nitvimol, K., & Sallis, J. F. (2022). What next? Expanding our view of city planning and global health, and implementing and monitoring evidence-informed policy. *The Lancet Global Health*, 10(6), e919–e926. [https://doi.org/10.1016/S2214-109X\(22\)00066-3](https://doi.org/10.1016/S2214-109X(22)00066-3)
- Gleeson, J. (2025). From New Public Management to public value: Irish education policy through the lens of Statements of Strategy. *Irish Educational Studies*, 44(2), 201–220. <https://doi.org/10.1080/03323315.2023.2258118>
- Goodley, C., & Perryman, J. (2022). Beyond the ‘terrors of performativity’: Dichotomies, identities and escaping the panopticon. *London Review of Education*, 20(1).

<https://doi.org/10.14324/LRE.20.1.29>

- Gregersen-Hermans, J. (2021). Toward a curriculum for the future: Synthesizing education for sustainable development and internationalization of the curriculum. *Journal of Studies in International Education*, 25(4), 461–481. <https://doi.org/10.1177/10283153211031033>
- Guziak, M., Świtajska, A. J., & Šantrić-Miličević, M. (2025). Accreditation challenges in Polish medical education: Balancing the rapid surge in medical students' numbers with quality standards. *Education Sciences*, 15(9), 1188. <https://doi.org/10.3390/educsci15091188>
- Hazin, M., Yani, M. T., Trihantoyo, S., Rusdinal, R., Sulastri, S., & Rahmawati, N. W. D. (2025). Analyzing digitalization in education policy in Indonesia through the policy analysis triangle model. *Journal of Posthumanism*, 5(1). <https://doi.org/10.63332/joph.v5i1.631>
- Heleta, S., & Chasi, S. (2023). Curriculum decolonization and internationalization. *Journal of International Students*, 14(2), 75–90. <https://doi.org/10.32674/jis.v14i2.6383>
- Higham, I. (2026). Early adoption of international policy innovations: A theoretical framework – with evidence on business and human rights in Colombia and Ecuador. *Review of International Studies*, 52(1), 81–103. <https://doi.org/10.1017/S026021052400072X>
- Holst, J., Singer-Brodowski, M., Brock, A., & de Haan, G. (2024). Monitoring SDG 4.7: Assessing education for sustainable development in policies, curricula, training of educators and student assessment (input-indicator). *Sustainable Development*, 32(4), 3908–3923. <https://doi.org/10.1002/sd.2865>
- Indrawati, S. M., & Kuncoro, A. (2021). Improving competitiveness through vocational and higher education: Indonesia's vision for human capital development in 2019–2024. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 57(1), 29–59. <https://doi.org/10.1080/00074918.2021.1909692>

- Jannata, T., Sumaryanto, S., Hadi, S., & Setiawan, C. (2024). Implementation of two policies in physical education in Indonesia: Structural equiting model analysis. *Retos*, 57, 18–24. <https://doi.org/10.47197/retos.v57.104041>
- Jayadi, K., Abduh, A., & Basri, M. (2022). A meta-analysis of multicultural education paradigm in Indonesia. *Heliyon*, 8(1), e08828. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e08828>
- Jin, Y. (2023). The rise of education globalization: Embracing opportunities and overcoming challenges. *Advances in Economics and Management Research*, 8(1), 62. <https://doi.org/10.56028/aemr.8.1.62.2023>
- Kar, S. S., Dube, R., George, B. T., Bairy, L. K., Hajeer, A. H., & Matalka, I. I. A. (2025). Implementation of United Arab Emirates competency framework for medical education in undergraduate medical curriculum. *BMC Medical Education*, 25(1), 782. <https://doi.org/10.1186/s12909-025-07342-0>
- Kathula, D. N. (2025). Competency-based curriculum implementation and digitalisation in Africa: Successes, challenges and solutions as meta-analysis from 2017 to 2024. *Journal of Education*, 8(1), 79–161. <https://doi.org/10.53819/81018102t4331>
- Kayyali, M. (2021). Globalization and internationalization: ISO 21001 as a trigger and prime key for quality assurance of higher education institutions. *International Journal of Applied Science and Engineering*, 9(1). <https://doi.org/10.30954/2322-0465.1.2021.7>
- Khalid, S., Baig, L. A., & Arooj, M. (2025). Social accountability in medical school curricula in Punjab, Pakistan: A qualitative analysis. *BMC Medical Education*, 25(1), 1000. <https://doi.org/10.1186/s12909-025-07268-7>
- Kosim, M., Muqoddam, F., Mubarak, F., & Laila, N. Q. (2023). The dynamics of Islamic education policies in Indonesia. *Cogent Education*, 10(1). <https://doi.org/10.1080/2331186X.2023.2172930>
- Lastimoso, J. K., Olivar, N., & Galigao, R. (2025). Globalization in

- education. *Pantao (International Journal of the Humanities and Social Sciences)*. <https://doi.org/10.69651/PIJHSS0402111>
- Le, Q. C., Bui, M. H., Khuong, Q. L., Le, P. A., Tran, D. T., Nguyen Vu, Q. H., & Vu, N. V. (2025). Developing institutional policies for health professionals' education reform: A case study of medical education in Viet Nam. *The Lancet Regional Health - Western Pacific*, 57, 101551. <https://doi.org/10.1016/j.lanwpc.2025.101551>
- Leite, S. (2022). Using the SDGs for global citizenship education: Definitions, challenges, and opportunities. *Globalisation, Societies and Education*, 20(3), 401-413. <https://doi.org/10.1080/14767724.2021.1882957>
- Ling, T., Shen, Y., Zhang, Y., Tang, J., & Zhao, E. (2024). Medical education reform in China in the 21st century: A literature review. *Advances in Medical Education and Practice*, 15, 1313-1324. <https://doi.org/10.2147/AMEP.S489903>
- Macheridis, N., & Paulsson, A. (2021). Tracing accountability in higher education. *Research in Education*, 110(1), 78-97. <https://doi.org/10.1177/0034523721993143>
- Maddox, R., & Morton Ninomiya, M. E. (2025). Indigenous sovereignty in research and epistemic justice: Truth telling through research. *Global Public Health*, 20(1). <https://doi.org/10.1080/17441692.2024.2436436>
- Maher, M., Hazenberg, R., & Paterson-Young, C. (2024). 'We need the activists to be more entrepreneurial': Global versus local modes of thought on the development of social enterprise support systems in transitioning economies. *Global Networks*, 24(3). <https://doi.org/10.1111/glob.12470>
- Mani, Z. A. (2025). Transitioning to competency-based education in nursing: A scoping review of curriculum review and revision strategies. *BMC Nursing*, 24(1), 1111. <https://doi.org/10.1186/s12912-025-03319-y>
- Marginson, S. (2022). What is global higher education? *Oxford Review of Education*, 48(4), 492-517.

<https://doi.org/10.1080/03054985.2022.2061438>

- Marginson, S., & Xu, X. (2023). Hegemony and inequality in global science: Problems of the center-periphery model. *Comparative Education Review*, 67(1), 31–52. <https://doi.org/10.1086/722760>
- Maroy, C., & Pons, X. (2021). Re-conceptualising education policy trajectories in a globalised world: Lessons from a multi-level comparison of accountability in France and Quebec. *Comparative Education*, 57(4), 560–578. <https://doi.org/10.1080/03050068.2021.1981714>
- Mogilner, M., & Gerasimov, I. (2024). Decolonization as an epistemic effort means treating empire as a category of analysis. *Forum for Modern Language Studies*, 60(3), 366–372. <https://doi.org/10.1093/fmls/cqae036>
- Mohammad, E. Y. (2025). Management policies for education in the age of globalization. *EuroGlobal Journal of Linguistics and Language Education*, 2(3), 4–20. <https://doi.org/10.69760/egille.2500192>
- Mohammad, A., Schwerhoff, G., & Linsenmeier, M. (2022). The international diffusion of policies for climate change mitigation. *IMF Working Papers*, 2022(115), 1. <https://doi.org/10.5089/9798400213090.001>
- Moshtari, M., & Safarpour, A. (2024). Challenges and strategies for the internationalization of higher education in low-income East African countries. *Higher Education*, 87(1), 89–109. <https://doi.org/10.1007/s10734-023-00994-1>
- Mulcahy, G., Boelsen-Robinson, T., Hart, A. C., Pesantes, M. A., Sameeha, M. J., Phulkerd, S., Alsukait, R. F., & Thow, A. M. (2022). A comparative policy analysis of the adoption and implementation of sugar-sweetened beverage taxes (2016–19) in 16 countries. *Health Policy and Planning*, 37(5), 543–564. <https://doi.org/10.1093/heapol/czac004>
- Musthaq, F. (2021). Dependency in a financialised global economy. *Review of African Political Economy*, 48(167). <https://doi.org/10.1080/03056244.2020.1857234>

- Ndlovu-Gatsheni, S. J. (2021). Internationalisation of higher education for pluriversity: A decolonial reflection. *Journal of the British Academy*, 9s1, 77–98. <https://doi.org/10.5871/jba/009s1.077>
- Nurman, Yusriadi, Y., & Hamim, S. (2022). Development of pluralism education in Indonesia: A qualitative study. *Journal of Ethnic and Cultural Studies*, 9(3), 106–120. <https://doi.org/10.29333/ejecs/1207>
- Oldac, Y. I., Nkansah, J. O., & Yang, L. (2024). ‘West is must, the rest is optional’: Epistemic injustice and positional good in international research collaboration. *Higher Education*, 88(2), 505–522. <https://doi.org/10.1007/s10734-023-01127-4>
- Padil, M., Asy’arie, B. F., Pranajaya, S. A., Alfiyanto, A., Wahyudi, D., Mahdi, M., Wahyudin, A., & Tharaba, M. F. (2025). Political exploration and Islamic education methods in Indonesia: A systematic literature review in the perspective of Sustainable Development Goals (SDGs). *Journal of Posthumanism*, 5(3). <https://doi.org/10.63332/joph.v5i3.839>
- Parker, L. D., Guthrie, J., & Martin-Sardesai, A. (2024). Performance management in the Australian higher education system – A historically informed critique. *Accounting History*, 29(2), 215–235. <https://doi.org/10.1177/10323732241230348>
- Pham Xuan, R., & Håkansson Lindqvist, M. (2025). Exploring sustainable development goals and curriculum adoption: A scoping review from 2020–2025. *Societies*, 15(8), 212. <https://doi.org/10.3390/soc15080212>
- Phyak, P. (2021). Epistemicide, deficit language ideology, and (de)coloniality in language education policy. *International Journal of the Sociology of Language*, 2021(267–268), 219–233. <https://doi.org/10.1515/ijsl-2020-0104>
- Pietersen, D., Ndofirepi, A., & Langeveldt, D. C. (2025). Philosophical perspectives of cultural imperialism, hegemony, and knowledge colonization in the African university. *International Journal of Learning, Teaching and Educational Research*, 24(9), 570–583. <https://doi.org/10.26803/ijlter.24.9.28>

- Pratt, B., & de Vries, J. (2023). Where is knowledge from the global South? An account of epistemic justice for a global bioethics. *Journal of Medical Ethics*, 49(5), 325–334. <https://doi.org/10.1136/jme-2022-108291>
- Rashid, A., & Whitehead, C. (2022). Applying postcolonial theory in academic medicine. *Journal of the Royal Society of Medicine*, 115(5), 193–194. <https://doi.org/10.1177/01410768221084081>
- Rashid, M. A., & Grant, J. (2024). Power and place: Uncovering the politics of global medical education. *Medical Education*, 58(8), 930–938. <https://doi.org/10.1111/medu.15459>
- Rashid, M. A., Ali, S. M., & Dharanipragada, K. (2023). Decolonising medical education regulation: A global view. *BMJ Global Health*, 8(6), e011622. <https://doi.org/10.1136/bmjgh-2022-011622>
- Research of education for sustainable development: Understanding new emerging trends and issues after SDG 4. (2024). *Journal of Sustainability Research*, 6(1). <https://doi.org/10.20900/jsr20240006>
- Rosidin, A., Sudirman, S., Mufti, M. I., Pramono, S. A., Susanty, L., Dudin, A., Ernawati, Arifin, A., & R, M. D. (2025). Exploring educational policy innovations and curriculum development in Indonesian higher education: A systematic review. *Journal of Education Culture and Society*, 16(2), 943–958. <https://doi.org/10.15503/jecs2025.3.943.958>
- Rushiti, R., & Kananaj, A. (2024). Searching for a better educational system: Language planning in competency-based school curriculum. *Revista de Gestão Social e Ambiental*, 18(1), e06485. <https://doi.org/10.24857/rgsa.v18n1-133>
- Saa, S. (2024). Merdeka curriculum: Adaptation of Indonesian education policy in the digital era and global challenges. *Revista de Gestão Social e Ambiental*, 18(3), e07323. <https://doi.org/10.24857/rgsa.v18n3-168>
- Sahadevan, S., Kurian, N., Mani, A. M., Kishor, M. R., & Menon, V. (2021). Implementing competency-based medical education curriculum in

- undergraduate psychiatric training in India: Opportunities and challenges. *Asia-Pacific Psychiatry*, 13(4). <https://doi.org/10.1111/appy.12491>
- Saini, M., Sengupta, E., Singh, M., Singh, H., & Singh, J. (2023). Sustainable Development Goal for Quality Education (SDG 4): A study on SDG 4 to extract the pattern of association among the indicators of SDG 4 employing a genetic algorithm. *Education and Information Technologies*, 28(2), 2031–2069. <https://doi.org/10.1007/s10639-022-11265-4>
- Samala, A. D., Rawas, S., Criollo-C, S., Bondarenko, O., Gentarefori Samala, A., & Novaliendry, D. (2024). Harmony in education: An in-depth exploration of Indonesian academic landscape, challenges, and prospects towards the Golden Generation 2045 vision. *TEM Journal*, 2436–2456. <https://doi.org/10.18421/TEM133-71>
- Saniee, N., Motamed, S., Barati, M., Goodarzi, F., Hassanzadeh, G., Kohpayehzadeh, J., Ezati, E., & Khazaei, A. (2025). Components of social accountability in medical education: A scoping review. *BMC Medical Education*, 25(1), 349. <https://doi.org/10.1186/s12909-025-06873-w>
- Sever, S. D., Tok, E., & Sellami, A. L. (2025). Sustainable Development Goals in a transforming world: Understanding the dynamics of localization. *Sustainability*, 17(6), 2763. <https://doi.org/10.3390/su17062763>
- Shah, A. P., Walker, K. A., Walker, K. G., & Cleland, J. (2023). Context matters in curriculum reform: An analysis of change in surgical training. *Medical Education*, 57(8), 741–752. <https://doi.org/10.1111/medu.15071>
- Shultz, L., & Viczko, M. (2021). What are we saving? Tracing governing knowledge and truth discourse in global COVID-19 policy responses. *International Review of Education*, 67(1–2), 219–239. <https://doi.org/10.1007/s11159-021-09893-y>
- Sirajuddin, Ahmad, M., & Suryadi. (2025). Evaluasi implementasi kebijakan pendidikan dalam perspektif filsafat pendidikan di Indonesia. *Al-Wasathiyah: Journal of Islamic Studies*, 4(1), 21–30.

<https://doi.org/10.56672/rjxe8485>

Song, J. (2025). Institutional contestations and educational equity: Incorporation of the marginalized in National Education Policies Worldwide, 1960–2019. *Social Forces*.

<https://doi.org/10.1093/sf/soaf192>

Steiner-Khamsi, G. (2024). Global governance of education: The historical and contemporary entanglements of UNESCO, the OECD and the World Bank. *International Review of Education*, 70(4), 699–701. <https://doi.org/10.1007/s11159-024-10106-5>

Steiner-Khamsi, G., Martens, K., & Ydesen, C. (2024). Governance by numbers 2.0: Policy brokerage as an instrument of global governance in the era of information overload. *Comparative Education*, 60(4), 537–554.

<https://doi.org/10.1080/03050068.2024.2308348>

Stepanovic, S. (2024). Resilience to physical and emotional stress. *Journal Human Research in Rehabilitation*, 14(1), 143–148.

<https://doi.org/10.21554/hrr.042414>

Stewart, T. (2026). Panoptic pedagogy: A Foucauldian debate on micromanagement in nursing education. *Nurse Education Today*, 157, 106910.

<https://doi.org/10.1016/j.nedt.2025.106910>

Sulistiyono, S. T., Hattori, M., Rochwulaningsih, Y., Matsumoto, A., Masruroh, N. N., & Widisuseno, I. (2025). The dynamics of state-market relations in the quest for world-class universities in Indonesia. *Discover Sustainability*, 6(1), 864.

<https://doi.org/10.1007/s43621-025-01635-6>

Suprpto, N., Prahani, B. K., & Cheng, T. H. (2021). Indonesian curriculum reform in policy and local wisdom: Perspectives from science education. *Jurnal Pendidikan IPA Indonesia*, 10(1), 69–80.

<https://doi.org/10.15294/jpii.v10i1.28438>

Suyadi, Nuryana, Z., Sutrisno, & Baidi. (2022). Academic reform and sustainability of Islamic higher education in Indonesia. *International Journal of Educational Development*, 89, 102534.

<https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2021.102534>

- Taha, M. H., Abdalla, M. E., Cameron, E., Dharamasi, S., Strasser, R., Taylor, D., & Green-Thompson, L. (2026). Leadership as a catalyst for advancing social accountability in health professions education: AMEE Guide No. 187. *Medical Teacher*, 48(3), 344–356. <https://doi.org/10.1080/0142159X.2025.2534074>
- Ulybina, O. (2022). Explaining the cross-national pattern of policy shift toward childcare deinstitutionalization. *International Journal of Sociology*, 52(2), 128–155. <https://doi.org/10.1080/00207659.2022.2031488>
- Umesh Dhungel. (2025). The role of globalization in the internationalization of higher education. *International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology*, 536–540. <https://doi.org/10.48175/IJAR SCT-28461>
- Urushibara-Miyachi, Y., Matsushita, K., & Nishigori, H. (2024). Development of a competency-based national model core curriculum in Japan: A case study. *Medical Teacher*, 46(sup1). <https://doi.org/10.1080/0142159X.2024.2388906>
- van Kraaij, J., Veenstra, M., Stalpers, D., Schoonhoven, L., Vermeulen, H., & van Oostveen, C. (2023). Uniformity along the way: A scoping review on characteristics of nurse education programs worldwide. *Nurse Education Today*, 120, 105646. <https://doi.org/10.1016/j.nedt.2022.105646>
- Vanderhoven, E. (2023). Unpacking the global apprenticeship agenda: A comparative synthesis of literature from international organisations in the education policy field. *Globalisation, Societies and Education*, 1–18. <https://doi.org/10.1080/14767724.2023.2252358>
- Wartoyo, F. X. (2025). Harmonization of the National Education System Law No. 20 of 2003 based on dignified justice. *Journal of Posthumanism*, 5(5), 2589–2597. <https://doi.org/10.63332/joph.v5i5.1649>
- Widaningsih, & Rahman, N. A. (2023). Educational equity in a globalized era: Comparative insights from Southeast Asia and other developing regions. *Sinergi International Journal of Education*, 1(3),

163–177. <https://doi.org/10.61194/education.v1i3.582>

Wiegleb, V., & Bruns, A. (2025). Whose knowledge counts? Unpacking the uneven geographies and politics of knowledge co-production in IPBES. *Human Ecology*, 53(1), 73–86.

<https://doi.org/10.1007/s10745-025-00578-w>

Wu, A., Choi, E., Diderich, M., Shamim, A., Rahhal, Z., Mitchell, M., Leask, B., & DeWit, H. (2022). Internationalization of medical education — motivations and formats of current practices. *Medical Science Educator*, 32(3), 733–745. <https://doi.org/10.1007/s40670-022-01553-6>

Xiong, Z., Wang, Q., Normand, R., & Zhang, X. (2025). Using global competence as a pedagogical approach to teach Sustainable Development Goals in higher education. *International Journal of Sustainability in Higher Education*. <https://doi.org/10.1108/IJSHE-06-2024-0401>

PROFIL PENULIS




Randitha Missouri, M.Pd.

Seorang penulis dan tenaga pendidik pada Program Studi Pendidikan Agama Islam Universitas Muhammadiyah Bima. Ketertarikan penulis pada bidang manajemen pendidikan dimulai sejak tahun 2006 silam, ketika menjuarai lomba karya ilmiah tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP). Lahir di Rabangodu-Bima, 20 April 1992 Kota Bima, Nusa Tenggara

Barat. Menamatkan pendidikan program sarjana (S1) di Universitas Mataram Prodi Pendidikan Bahasa Inggris dan menyelesaikan program pascasarjana (S2) di Universitas Negeri Yogyakarta Prodi Manajemen Pendidikan. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Samsurizal dan Ibu Siti Nurkasmir. Sebagai akademisi, penulis aktif dalam kegiatan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, khususnya di bidang manajemen pendidikan. Penulis mulai aktif menulis buku sejak tahun 2023. Buku ini merupakan buku ke-sebelas, judul buku yang pernah ditulis antara lain: Manajemen Mutu Pendidikan, Micro Teaching, Kebijakan Pendidikan, Manajemen Pendidikan, Metodologi Penelitian, Strategi Pembelajaran Anak Usia Dini, Pendidikan di Era Digital, dan Manajemen Pengelolaan Kelas. Penulis berharap dapat memberikan kontribusi positif pada dunia pendidikan melalui karya tulis ilmiah dan buku, terutama dalam menumbuhkan generasi unggul secara akademik dan berkarakter.

Email Penulis: randitha44@gmail.com



BAB 3
KEBIJAKAN
PENGEMBANGAN
KURIKULUM PADA ERA
GLOBAL

Sri Intan Wahyuni, M.Pd.I
STIT Diniyyah Puteri Rahmah el Yunusiyah



Pendahuluan

Globalisasi telah mendorong perubahan besar dalam sistem pendidikan di berbagai negara. Perubahan ini menuntut kurikulum yang tidak hanya berorientasi pada penguasaan konten, tetapi juga pada pengembangan kompetensi. Transformasi kurikulum abad ke-21 menekankan keterampilan berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, dan komunikasi. Penelitian menunjukkan bahwa reformasi kurikulum harus bersifat sistemik dan fleksibel agar mampu menjawab kompleksitas global (Widiana et al., 2025). Integrasi kompetensi global dan nilai lokal menjadi fondasi penting dalam pembaruan kebijakan pendidikan (Cahya & Meliyani, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa pengembangan kurikulum di era global harus adaptif sekaligus kontekstual. Maka kebijakan kurikulum menjadi instrumen strategis dalam membangun daya saing bangsa.

Di Indonesia, reformasi kurikulum terus mengalami dinamika seiring perubahan kebijakan nasional. Pergeseran menuju pendekatan berbasis kompetensi menjadi ciri utama reformasi pendidikan. Salah satu pendekatan yang mendapatkan perhatian global adalah *Competency Based Education (CBE)*, yakni model pembelajaran yang berorientasi pada pencapaian kompetensi tertentu daripada penguasaan materi secara linier atau waktu belajar yang kaku. (Judijanto & Arinie, 2025). Implementasi *Competency-Based Education (CBE)* dipandang sebagai langkah untuk menyelaraskan pendidikan dengan kebutuhan global (Mustofa et al., 2025). Namun, data di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan antara desain kebijakan dan praktik di kelas. Kendala seperti pelatihan guru yang terbatas dan sistem asesmen yang belum optimal masih menjadi tantangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa reformasi kurikulum memerlukan dukungan kelembagaan yang kuat. Agar kurikulum baru dapat dijalankan sesuai harapan, guru perlu benar-benar memahami seluruh komponen yang terkandung dalam kurikulum tersebut. Sehebat apapun suatu kurikulum baru yang dirancang, apabila guru sebagai ujung tombak tidak mampu menerapkannya dengan baik dalam proses pembelajaran, maka pelaksanaan kurikulum tersebut akan mengalami hambatan. (MASKUR, 2023). Oleh karena itu, analisis empiris terhadap implementasi kebijakan menjadi penting dilakukan.

Kebijakan Kurikulum Merdeka merupakan bagian dari agenda transformasi pendidikan nasional. Kurikulum ini menekankan pembelajaran berpusat pada siswa dan penguatan proyek berbasis kompetensi. Studi menunjukkan bahwa Kurikulum Merdeka mendorong peningkatan keterlibatan dan otonomi belajar siswa (Hunaepi & Suharta, 2024). Pendekatan *Project-Based Learning (PBL)* terbukti memiliki efek signifikan terhadap peningkatan berpikir kritis dan kolaborasi (Usman, 2025). Meskipun demikian, tantangan implementasi masih terjadi di berbagai daerah. Kesenjangan sumber daya dan kesiapan guru menjadi faktor penghambat utama. Hal ini memperlihatkan perlunya evaluasi kebijakan secara komprehensif.

Peran guru menjadi kunci utama dalam keberhasilan reformasi kurikulum. Penelitian menunjukkan bahwa banyak guru menghadapi kesulitan beradaptasi dengan perubahan kurikulum (Syarifuddin & Hz, 2023). Keterbatasan pelatihan dan akses teknologi memperlambat proses transisi. Studi lain menegaskan bahwa persepsi guru terhadap reformasi sangat memengaruhi keberhasilan implementasi (Kumayas, Luntungan, Arsai, & Tatipang, 2025). Selain itu, kualitas dan standar kompetensi guru menjadi faktor pembeda dalam sistem pendidikan maju (Khairiyah, Mariati, Suprpto, & Mariana, 2024). Dengan demikian, penguatan kapasitas guru harus menjadi prioritas kebijakan. Tanpa dukungan profesional yang memadai, reformasi kurikulum sulit mencapai tujuan optimal.

Dalam konteks global, banyak negara melakukan reformasi kurikulum untuk meningkatkan relevansi pendidikan. Kolaborasi internasional dan pendekatan berbasis kompetensi menjadi strategi umum dalam reformasi tersebut (Henriquez et al., 2024). Pengalaman negara lain menunjukkan bahwa evaluasi sistematis dan pelatihan berkelanjutan sangat penting. Reformasi pendidikan juga memerlukan integrasi teknologi dan inovasi pembelajaran (Frenk et al., 2022). Perbandingan sistem pendidikan Kanada dan Indonesia memperlihatkan perbedaan dalam tata kelola dan desentralisasi kurikulum (Tuerah, Nonis, & Mesra, 2024). Analisis komparatif ini dapat memberikan wawasan untuk perbaikan kebijakan nasional. Oleh sebab itu, perspektif global penting dalam menilai arah reformasi Indonesia.

Daftar Pustaka

- Acosta, I., & Acosta, A. (2017). A Mixed Methods Study on Teachers' Perceptions of Readiness of Higher Education Institutions to the Implementation of the K-12 Curriculum. *Universal Journal of Educational Research*, 5, 1215–1232. Retrieved from <https://doi.org/10.13189/ujer.2017.050714>
- Cahya, O. D., & Meliyani, S. (2025). 21st Century Skills and Character Education: Building Indonesia's Future-Ready Generation. *Journal of Smart Pedagogy and Education*. Retrieved from <https://doi.org/10.65101/spedu.v1i1.19>
- Eid, M., & Alsenaidi, S. (2025). Developing future skills in teacher education. *Journal of Interdisciplinary Studies in Education*. Retrieved from <https://doi.org/10.32674/jhh4r097>
- Firdaus, M., Fuad, Z., Kusaeri, & Rusydiyah, E. (2023). Portrait of Teacher Competence and Implementation Challenges of Achieving Sustainable Development Goals (SDGs): A Comparative Study between Indonesia and Vietnam. *Jurnal Iqra': Kajian Ilmu Pendidikan*. Retrieved from <https://doi.org/10.25217/ji.v8i2.3161>
- Frenk, J., Chen, L., Chandran, L., Groff, E., King, R., Meléis, A., & Fineberg, H. (2022). Challenges and opportunities for educating health professionals after the COVID-19 pandemic. *Lancet (London, England)*, 400, 1539–1556. Retrieved from [https://doi.org/10.1016/s0140-6736\(22\)02092-x](https://doi.org/10.1016/s0140-6736(22)02092-x)
- Ginanjari, D., Fuad, F., Abduh, M., & Mulyana, B. B. (2024). Perkembangan Kurikulum di Indonesia: Adaptasi terhadap Perubahan Zaman dan Kebutuhan Masyarakat, 2(3), 296–306.
- Handayani, S., & Ifitiyani, W. (2024). O f a h, 4(November), 4333–4344.
- Harteis, C., Goller, M., & Caruso, C. (2020). Conceptual Change in the Face of Digitalization: Challenges for Workplaces and Workplace Learning. *Frontiers in Education*, Volume 5-2020. Retrieved from <https://www.frontiersin.org/journals/education/articles/10.3389/feduc.2020.00001>

- Henriquez, G., Carranza, F. C., Varela, K., Ulloa, J. S., Reyes, R., & Solano, J. (2024). Evidence-Based Strategies for Reforming the Medical Curriculum at the National Autonomous University of Honduras: A Systematic Literature Review. *Cureus*, 16. Retrieved from <https://doi.org/10.7759/cureus.68729>
- Jalil, A., & Juanda, A. (2025). MERANCANG PENGEMBANGAN KURIKULUM ADAPTIF DI ERA DISRUPSI: STRATEGI TRANSFORMASIONAL UNTUK PENDIDIKAN ABAD – 21, 8(2), 13–26.
- Judijanto, L., & Arinie, F. (2025). Pemetaan Literatur Competency-Based Education dalam Praktik Pendidikan Tinggi Global melalui Kajian Bibliometrik, 7(2), 370–378.
- Khairiyah, U., Mariati, P., Suprpto, N., & Mariana, N. (2024). Comparative Analysis: Conceptualization of Teacher Quality in Indonesia and Singapore. *Indonesian Journal of Educational Research and Review*. Retrieved from <https://doi.org/10.23887/ijerr.v7i1.64203>
- Kumayas, T., Luntungan, G., Arsai, A., & Tatipang, D. (2025). Curriculum Reform Meets Classroom Realities: Selected Indonesian Teachers' Perspectives on the Merdeka Curriculum. *REiLA : Journal of Research and Innovation in Language*. Retrieved from <https://doi.org/10.31849/5x19dj04>
- MASKUR, M. (2023). DAMPAK PERGANTIAN KURIKULUM PENDIDIKAN TERHADAP PESERTA DIDIK SEKOLAH DASAR. *Jurnal Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (JKIP)*, 1, 190–203. Retrieved from <https://doi.org/10.61116/jkip.v1i3.172>
- Mustofa, I., Dara, S., & Sok, V. (2025). Policy and Practice of Competency-Based Education in Indonesia: Challenges and Prospects for the Future. *Journal Emerging Technologies in Education*. Retrieved from <https://doi.org/10.70177/jete.v3i2.2131>
- Syarifuddin, S., & Hz, B. I. R. (2023). ADAPTING TO CHANGE: THE EXPERIENCES OF EFL TEACHERS WITH CURRICULUM REFORM. *Language Literacy: Journal of Linguistics, Literature, and Language*

- Teaching*. Retrieved from <https://doi.org/10.30743/ll.v7i2.7887>
- Tuerah, P., Nonis, N., & Mesra, R. (2024). Comparative Study of Education Systems in Canada and Indonesia. *ETIC (EDUCATION AND SOCIAL SCIENCE JOURNAL)*. Retrieved from <https://doi.org/10.64924/218sdt95>
- Usman, M. (2025). Transforming Classrooms through PBL: Lessons from Indonesia's Curriculum Reforms and Global South Contexts. *Eduscape: Journal of Education Insight*. Retrieved from <https://doi.org/10.61978/eduscape.v3i3.1108>
- Wu, J., Tang, K.-P., Hsu, Y., Yang, Y.-T., Chu, J.-S., Lin, Y.-K., & Hou, W. (2022). Medical undergraduates' self-evaluation: before and after curriculum reform. *BMC Medical Education*, 22. Retrieved from <https://doi.org/10.1186/s12909-022-03330-w>

PROFIL PENULIS




Sri Intan Wahyuni, M.Pd.I.

Penulis menyelesaikan pendidikan S1 pada jurusan Kependidikan Islam UIN Sunan Kalijaga (sekarang Manajemen Pendidikan Islam, Yogyakarta tahun 2009, kemudian penulis melanjutkan S2 pada jurusan Manajemen Kebijakan Pendidikan Islam (MKPI) di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta tahun 2012. Saat ini, penulis sedang menempuh pendidikan S3 Manajemen

Pendidikan di Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Semarang (UNNES). Penulis memulai karir pada tahun 2014 sebagai dosen tetap pada prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD) STIT Diniyyah Puteri Rahmah El Yunusiyah. Selama menjadi dosen tetap pada prodi PIAUD STIT Diniyyah Puteri Rahmah El Yunusiyah penulis juga aktif dalam Asosiasi Perkumpulan Dosen PIAUD, "PPIAUD" se Indonesia dan aktif menulis beberapa artikel yang dimuat dalam jurnal. Tahun 2018, penulis pernah mendapat dana hibah penelitian dari Litapdimas, di antara tulisan yang dimuat di dalam jurnal adalah *Manajemen Kurikulum Pendidikan Agama Islam bagi Anak Berkebutuhan Khusus di SLB Al Azhar Bukittinggi* MANAGERIA: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam 4 (2), 219-240

DOI: <https://doi.org/10.14421/manageria.2019.42-03>. *Manajemen Sarana Prasarana Di RA Rahmah El Yunusiyah Padang Panjang* Vol. 1 No. 1 (2021); Jurnal TILA. *Improving Literacy Skills through Letter Ball Games for Children 5-6 Years Old* (2022) <https://ojs.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/ijecer/article/view/8213/3195>, dan beberapa artikel lainnya.


Email penulis : [sriintanwahyuni204@gmail.com/](mailto:sriintanwahyuni204@gmail.com)
sriintanwahyuni204@students.unnes.ac.id



BAB 4

**SEJARAH KEBIJAKAN
PENDIDIKAN PADA ERA
ORDE LAMA, ORDE
BARU DAN REFORMASI**

Sugiarto, S.Pd., M.Pd.
Pengawas SMA Cabang dinas Pendidikan Wilayah XI
Provinsi Jawa Tengah



Pendahuluan

Pendidikan memiliki posisi strategis dalam pembangunan nasional karena berperan dalam membentuk kualitas sumber daya manusia yang menjadi penggerak utama kemajuan bangsa. Dalam perspektif teori modal manusia yang dikemukakan oleh Theodore W. Schultz, pendidikan dipandang sebagai investasi jangka panjang yang memberikan kontribusi signifikan terhadap produktivitas individu dan pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, keberhasilan pembangunan suatu negara sangat bergantung pada kualitas sistem pendidikannya.

Dalam konteks global, sistem pendidikan menghadapi tantangan yang semakin kompleks akibat perkembangan teknologi, globalisasi, serta perubahan kebutuhan pasar kerja. OECD menegaskan bahwa pendidikan abad ke-21 harus mampu mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, dan kolaborasi. Sementara itu, UNESCO melalui agenda Education 2030 menekankan pentingnya pendidikan yang inklusif, adil, dan berkualitas sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan.

Namun, sistem pendidikan di Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan, seperti ketimpangan akses, rendahnya kualitas pembelajaran, serta kesenjangan antarwilayah. Hasil penelitian dari berbagai jurnal SINTA menunjukkan bahwa kualitas pembelajaran di Indonesia masih didominasi oleh pendekatan konvensional yang kurang mendorong kemampuan berpikir tingkat tinggi. Selain itu, berbagai kebijakan yang telah dirumuskan sering kali belum diimplementasikan secara optimal di lapangan.

Secara historis, kebijakan pendidikan di Indonesia mengalami dinamika yang sangat dipengaruhi oleh perubahan sistem politik. Setiap periode pemerintahan memiliki paradigma kebijakan yang berbeda, yang mencerminkan kepentingan ideologi, pembangunan ekonomi, serta reformasi tata kelola. Oleh karena itu, analisis terhadap kebijakan pendidikan perlu dilakukan secara komprehensif dengan mempertimbangkan aspek historis, regulatif, dan manajerial.

Kebijakan Pendidikan pada Era Orde Lama

Pada masa Orde Lama (1945–1966), pendidikan diposisikan sebagai instrumen strategis dalam perjuangan ideologi dan pembentukan identitas nasional. Dalam konteks pasca-kemerdekaan, pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai alat politik untuk menanamkan nilai nasionalisme, patriotisme, dan ideologi negara. Hal ini tercermin dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 yang menegaskan bahwa tujuan pendidikan adalah membentuk manusia susila, warga negara demokratis, dan bertanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Dengan demikian, pendidikan menjadi sarana penting dalam membangun kesatuan bangsa yang majemuk.

Secara kurikuler, pendidikan pada masa ini menunjukkan integrasi kuat antara aspek pedagogis dan ideologis. Kurikulum 1947, 1952, hingga 1964 tidak hanya memuat materi akademik, tetapi juga sarat muatan ideologi negara, terutama melalui konsep Manipol USDEK. Pendidikan diarahkan untuk membentuk manusia revolusioner yang memiliki kesadaran politik dan loyalitas terhadap negara, sehingga sekolah berfungsi sebagai agen sosialisasi politik sekaligus alat legitimasi kekuasaan.

Pandangan ini sejalan dengan pemikiran H.A.R. Tilaar yang menyatakan bahwa pendidikan pada masa Orde Lama bersifat indoktrinatif, di mana peserta didik diarahkan menerima nilai ideologis tanpa ruang berpikir kritis yang memadai. Proses pembelajaran lebih menekankan penyeragaman dibandingkan pengembangan nalar kritis, sehingga kebebasan akademik dan budaya ilmiah belum berkembang optimal. Dalam perspektif teori kebijakan pendidikan, kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan sangat dipengaruhi oleh kekuatan politik dan ideologi, sebagaimana ditegaskan oleh Stephen J. Ball bahwa kebijakan pendidikan tidak pernah netral.

Dari perspektif manajemen pendidikan, sistem pendidikan pada masa ini belum terkelola secara optimal. Fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi belum berjalan sistematis akibat keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur, serta kondisi ekonomi pasca kemerdekaan. Selain itu,

Daftar Pustaka

- Anderson, J. E. (2015). *Public policymaking: An introduction* (8th ed.). Cengage Learning.
- Arifin, Z. (2017). Kebijakan pendidikan dan implementasinya di Indonesia. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 2(1), 45–60.
- Ball, S. J. (2012). *Global education inc.: New policy networks and the neoliberal imaginary*. Routledge.
<https://doi.org/10.4324/9780203803301>
- Bjork, C. (2005). *Indonesian education: Teachers, schools, and central bureaucracy*. Routledge.
<https://doi.org/10.4324/9780203988039>
- Bush, T. (2011). *Theories of educational leadership and management* (4th ed.). Sage Publications.
- Dye, T. R. (2013). *Understanding public policy* (14th ed.). Pearson Education.
- Fullan, M. (2007). *The new meaning of educational change* (4th ed.). Teachers College Press.
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2019). *Future of education and skills 2030*. OECD Publishing.
<https://www.oecd.org/education/2030-project>
- Sahlberg, P. (2011). *Finnish lessons: What can the world learn from educational change in Finland?* Teachers College Press.
- Schultz, T. W. (1961). Investment in human capital. *The American Economic Review*, 51(1), 1–17.
- Suryadi, A. (2018). Desentralisasi pendidikan dan permasalahannya di Indonesia. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 25(2), 101–115.
- Tilaar, H. A. R. (2002). *Perubahan sosial dan pendidikan: Pengantar pedagogik transformatif*. Grasindo.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1950 tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah.

UNESCO. (2015). *Education 2030: Incheon declaration and framework for action*. UNESCO Publishing.

World Bank. (1998). *Education in Indonesia: From crisis to recovery*. World Bank Publications.

PROFIL PENULIS




Sugiarto, S.Pd., M.Pd.

Penulis memiliki ketertarikan pada bidang pendidikan ditandai dengan menempuh studi S1 Pendidikan Matematika di Universitas Negeri Semarang (UNNES) dan lulus pada tahun 2002. Selanjutnya, penulis menyelesaikan S2 Manajemen Pedagogi di Universitas Pancasakti (UPS) Tegal pada tahun 2025, dan saat ini sedang melanjutkan studi S3 Manajemen Kependidikan di Universitas Negeri Semarang (UNNES). Pengalaman sebagai pendidik dimulai sejak tahun 1997 pada jenjang SMP/MTs hingga SMA/SMK, serta pernah mengajar dan menjabat sebagai Kepala TPQ.

Penulis memiliki minat pada pengembangan pembelajaran, manajemen pendidikan, dan peningkatan numerasi peserta didik. Untuk meningkatkan kompetensi profesional, penulis telah mengikuti berbagai pelatihan, antara lain Pelatihan Guru Penggerak (2023), Pelatihan Pengajar Praktik (2024), dan Pelatihan Pengawas Sekolah (2025). Penulis juga aktif dalam kegiatan akademik seperti penelitian dan penulisan karya ilmiah sebagai kontribusi dalam peningkatan mutu pendidikan.

Email : sugiarto325@student.unnes.ac.id



BAB 5

RUMUSAN KEBIJAKAN

PENGEMBANGAN

KUALITAS DAN

KOMPETENSI GURU

DI INDONESIA

Muryadi, M.Pd.
Universitas Negeri Semarang



Pendahuluan

Bab ini lahir dari kegelisahan akademik sekaligus keprihatinan praktis terhadap masa depan pendidikan Indonesia. Dalam berbagai forum pendidikan, guru selalu disebut sebagai kunci utama mutu pendidikan. Namun, dalam praktiknya, kebijakan yang dirancang untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi guru masih sering berjalan secara terpisah, administratif, dan kurang menyentuh transformasi pembelajaran di kelas. Literatur terbaru tentang pengembangan profesional guru di Indonesia juga menunjukkan pola yang serupa: perhatian kebijakan cukup besar, tetapi dampak terhadap kualitas pembelajaran belum selalu sebanding dengan intensitas program yang dijalankan (Rahmi et al., 2025; Revina et al., 2023).

Bab ini berangkat dari keyakinan bahwa reformasi guru tidak dapat diselesaikan dengan menambah program demi program. Persoalan utamanya justru terletak pada arsitektur kebijakan: bagaimana pendidikan awal guru, pendidikan profesi, pelatihan dalam jabatan, supervisi, evaluasi, kepemimpinan sekolah, dan pemerataan wilayah dihubungkan dalam satu sistem yang utuh. Karena itu, Bab ini tidak hanya memaparkan kondisi kebijakan yang ada, tetapi juga menawarkan model konseptual baru untuk merekonstruksi kebijakan pengembangan guru di Indonesia.

Secara substansial, Bab ini menawarkan Model Arsitektur Kebijakan 3E-1D, yaitu *career-stage embedded development*, *ecosystem-based professional learning*, *equity-sensitive territorial governance*, dan *data-informed teacher progression*. Model ini diharapkan dapat menjadi jembatan antara diskursus akademik, perumusan kebijakan, dan praktik kepemimpinan pendidikan di lapangan.

Guru, Mutu Pendidikan, dan Tantangan Kebijakan di Indonesia

1. Guru Sebagai Titik Temu Kebijakan Dan Realitas Kelas

Guru merupakan simpul paling penting dalam sistem pendidikan karena guru adalah pelaku yang menerjemahkan kurikulum,

asesmen, dan visi pendidikan ke dalam pengalaman belajar nyata di kelas. Dalam bahasa yang lebih sederhana, mutu pendidikan pada akhirnya diuji bukan di dokumen kebijakan, tetapi di ruang kelas, dan di ruang kelas itulah guru menjadi penentu utama. Berbagai kajian mutakhir menegaskan bahwa peningkatan mutu pendidikan tidak dapat dilepaskan dari mutu guru, terutama ketika sistem pendidikan sedang menghadapi perubahan cepat dalam bidang kurikulum, digitalisasi, literasi, numerasi, dan kebutuhan kompetensi abad ke-21 (Rahmi et al., 2025; Revina et al., 2023).

Di Indonesia, isu ini menjadi semakin mendesak karena reformasi pendidikan tidak lagi hanya menuntut guru yang mampu mengajar, tetapi guru yang mampu beradaptasi, merefleksikan praktiknya, bekerja kolaboratif, memanfaatkan teknologi, dan menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan peserta didik. Tantangan itu semakin besar ketika kebijakan publik pada 2025–2026 mulai menekankan peningkatan kualifikasi akademik guru, transformasi Pendidikan Profesi Guru, penguatan kompetensi digital, serta perbaikan layanan pendidikan hingga wilayah 3T. Diskursus kelembagaan terbaru juga menunjukkan bahwa perhatian terhadap kualitas guru dan pemerataan pendidikan tetap menjadi agenda utama kebijakan nasional.

2. Mengapa Kebijakan Guru Perlu Ditinjau Ulang

Masalah utama dalam pengembangan guru di Indonesia bukan semata-mata kurangnya program. Justru, programnya relatif banyak: peningkatan kualifikasi, sertifikasi, PPG, pelatihan, komunitas belajar, dan berbagai intervensi lainnya. Namun, literatur menunjukkan bahwa banyaknya program belum otomatis menghasilkan transformasi pembelajaran yang kuat. Revina et al. (2023) menunjukkan bahwa reformasi pengembangan profesional guru di Indonesia cenderung mengganti program lama dengan program baru tanpa menyelesaikan masalah struktural yang berulang. Sementara itu, Tanang dan Abu (2014) menegaskan bahwa profesionalisme guru sangat ditentukan oleh dukungan kebijakan, pembiayaan, infrastruktur, dan komitmen sistemik, bukan semata oleh kesediaan individu guru untuk belajar.

Daftar Pustaka

- Amemasor, S. K., Oppong, S. O., Ghansah, B., Benuwa, B. B., & Essel, D. D. (2025). A systematic review on the impact of teacher professional development on digital instructional integration and teaching practices. *Frontiers in Education*.
- Ardi, P. (2023). Delving into Indonesian EFL pre-service teachers' professional identity configuration during teaching practicum. *TESOL Journal*.
- Asiyah, S., Wiyono, B. B., Hidayah, N., & Supriyanto, A. (2021). The effect of professional development, innovative work and work commitment on quality of teacher learning in elementary schools of Indonesia. *Eurasian Journal of Educational Research*.
- Krismanto, W., Khalik, A. R., Jufri, & Halik, A. (2023). Professional learning network activities of Indonesian teachers in social media and teacher professional development. *International Journal of Instruction*.
- Kurteshi, V., Behluli, A., & Rexhepi, J. (2025). The need for professional development in improving teaching quality: Teachers' perceptions of school-based professional development. *Frontiers in Education*.
- Liu, J., Chai, C. S., & Zhang, Y. (2024). Leveraging professional learning communities in linking digital professional development with digital instructional integration. *International Journal of STEM Education*.
- Rahmi, I., Rasanjani, S., Amri, K., & Masrizal. (2025). Enhancing teacher quality in Indonesia: The impact of teacher professional development programmes on SDG 4. *Social Sciences & Humanities Open*, 12, Article 102123.
- Revina, S., Pramana, R. P., Bjork, C., & Suryadarma, D. (2023). Replacing the old with the new: Long-term issues of teacher professional development reforms in Indonesia. *Asian Education and Development Studies*, 12(4/5), 262–274.
- Tanang, H., & Abu, B. (2014). Teacher professionalism and professional development practices in South Sulawesi, Indonesia. *Journal of Curriculum and Teaching*, 3(2), 25–42.

PROFIL PENULIS




Muryadi, M.Pd.

Ketertarikan penulis terhadap dunia pendidikan, pengembangan lembaga, website, dan pemograman tumbuh seiring dengan keterlibatan penulis dalam pengelolaan satuan pendidikan serta pengembangan sistem digital sekolah. Latar belakang akademik penulis dimulai dari jenjang S1 pada FKIP Bahasa Inggris, kemudian melanjutkan studi S2 Manajemen Pendidikan, dan saat ini sedang menempuh S3 Manajemen Pendidikan. Kombinasi antara pendidikan bahasa, manajemen pendidikan, dan ketertarikan pada teknologi membentuk cara pandang penulis yang integratif antara mutu pembelajaran, tata kelola lembaga, dan transformasi digital pendidikan.

Dalam perjalanan profesionalnya, penulis aktif bergelut di bidang manajemen pendidikan, penelitian dan pengembangan (R&D), serta pengembangan website dan sistem informasi pendidikan. Penulis terlibat dalam perancangan website sekolah, pengelolaan domain dan hosting, pengembangan Learning Management System (LMS), digitalisasi administrasi pendidikan, serta penyusunan grand design sistem informasi manajemen lembaga. Selain itu, penulis juga aktif menulis karya ilmiah, menyusun konsep strategis pengembangan lembaga pendidikan Islam, dan mendampingi penguatan mutu, kurikulum, SDM, serta tata kelola lembaga agar lebih profesional, adaptif, dan berdaya saing.

Saat ini penulis dipercaya mengemban berbagai peran strategis di lembaga pendidikan, antara lain sebagai Manajer Penelitian dan Pengembangan di LP Al Falah Darussalam Tropodo, Ketua LP Al Araf Islamic School Surabaya, Ketua LP Al Ibsyaar Islamic School Pasuruan, konsultan pendidikan DRA Islamic School Deli Serdang, serta Ketua LP KB-TK Sinergi Tropodo Waru Sidoarjo. Dengan perpaduan pengalaman akademik, kepemimpinan pendidikan, serta keterampilan di bidang website dan pemrograman, penulis

berkomitmen untuk terus memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan pendidikan yang unggul, modern, Islami, dan relevan dengan tantangan zaman.



BAB 6

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

PENGEMBANGAN

PENDIDIKAN DASAR

DI INDONESIA

Melati Indri Hapsari, S.KM, M.Kes.
Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Jawa Tengah



Pendahuluan

Pendidikan dasar merupakan fondasi utama pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas dan menjadi hak setiap warga negara Indonesia sebagaimana dijamin oleh UUD 1945 Pasal 31. Pemerintah berkewajiban menyelenggarakan sistem pendidikan nasional yang meningkatkan kualitas pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan dasar mencakup jenjang formal SD/MI, serta SMP/MTs (usia 7–15 tahun). Kebijakan pendidikan dasar di Indonesia berorientasi pada akses, kualitas pembelajaran, pemerataan, dan relevansi kurikulum terhadap kebutuhan masyarakat global.

Pendidikan dasar merupakan fondasi bagi seluruh proses pembelajaran sepanjang hayat. Pada tahap inilah kemampuan literasi, numerasi, pembentukan karakter, serta kebiasaan belajar mulai dibangun secara sistematis. Kualitas pendidikan pada jenjang ini sangat menentukan keberhasilan peserta didik dalam menempuh pendidikan menengah hingga tinggi. Kebijakan nasional menempatkan pendidikan dasar sebagai layanan esensial karena berfungsi membangun kompetensi minimum yang dibutuhkan warga negara untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik.

Pendidikan dasar di Indonesia mencakup enam tahun pendidikan SD/MI dan tiga tahun pendidikan SMP/MTs, yang menjadi bagian langsung dari wajib belajar yang diwajibkan pemerintah. Pemerintah Indonesia menetapkan wajib belajar minimal 9 tahun dan mengarah ke 12 tahun sebagai strategi peningkatan kualitas SDM. Partisipasi dalam pendidikan dasar di Indonesia telah meningkat, termasuk angka penyelesaian jenjang SD mencapai sekitar 97,83% pada 2023 (GoodStats, 2024).

Pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah meluncurkan program Wajib Belajar 13 Tahun. Kebijakan wajib belajar 13 tahun adalah perluasan dari program wajib belajar 12 tahun dengan menambahkan 1 tahun pendidikan prasekolah agar anak memperoleh fondasi kesiapan belajar sebelum masuk pendidikan dasar. Berdasarkan riset OECD (2017) melalui studi PISA menemukan siswa yang pernah mengikuti prasekolah umumnya memiliki performa membaca dan matematika lebih tinggi.

Walaupun angka partisipasi kasar meningkat, sebagian anak masih menghadapi hambatan untuk masuk dan bertahan di sekolah. Kelompok yang paling terdampak meliputi keluarga miskin, anak di daerah terpencil, dan mereka yang memiliki kebutuhan khusus. Menurut UNESCO (2020), perluasan akses tanpa kebijakan afirmatif akan membuat ketimpangan tetap bertahan, bahkan cenderung diwariskan antar generasi. Perbedaan kapasitas fiskal dan infrastruktur menyebabkan mutu layanan pendidikan dasar tidak merata. Sekolah di wilayah maju memiliki fasilitas lebih lengkap dan akses teknologi lebih baik dibanding daerah terpencil. Ketimpangan distribusi guru berkualitas juga memperkuat perbedaan hasil belajar. Desentralisasi pendidikan menuntut kemampuan perencanaan dan pengawasan di tingkat daerah. Namun variasi kapasitas birokrasi sering menimbulkan ketidaksinkronan kebijakan, alokasi sumber daya yang kurang tepat sasaran, serta lemahnya pemantauan mutu.

Alasan topik implementasi kebijakan pengembangan pendidikan dasar di Indonesia perlu dikaji karena pendidikan dasar sebagai fondasi sistem, kesenjangan antara kebijakan dan praktik, disparitas antar wilayah yang persisten, kompleksitas tata kelola desentralistik, tuntutan akuntabilitas publik, kebutuhan *evidence-based policy*.

Bab ini bertujuan untuk mendeskripsikan kebijakan pendidikan dasar nasional, menganalisis implementasi kebijakan pendidikan dasar di lapangan, mengidentifikasi tantangan dan rekomendasi kebijakan. Bab ini diharapkan secara teoritis memberikan wawasan mendalam tentang implementasi kebijakan pendidikan dasar, secara praktis memberikan rekomendasi kepada pemangku kepentingan dalam perbaikan kebijakan.

Konsep Kebijakan Pendidikan

Kebijakan pendidikan merupakan instrumen strategis negara dalam mengarahkan tujuan, distribusi sumber daya, serta praktik penyelenggaraan pendidikan. Dalam perspektif ilmu kebijakan publik, pendidikan dipahami sebagai arena tempat nilai, kepentingan, dan prioritas pembangunan dinegosiasikan serta diterjemahkan ke dalam tindakan administratif. Secara umum, kebijakan pendidikan dapat

Daftar Pustaka

- Anderson, J. E. (2015). *Public policymaking: An introduction* (8th ed.). Cengage.
- Dalillah, A., Indrawan, T. J., & Syaifudin, M. (2025). Konsep dasar analisis kebijakan pendidikan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(3), 39149–39154.
- Dye, T. R. (2013). *Understanding public policy* (14th ed.). Pearson.
- GoodStats. (2024). *97% anak di Indonesia menyelesaikan pendidikan SD pada 2023*. BPS RI.
- Jannah, N. W., dkk. (2024). Konsep kebijakan dan kebijakan pendidikan. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*.
- OECD. (2017). *Starting strong 2017: Key OECD indicators on early childhood education and care*. OECD Publishing.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- UNESCO. (2015). *Education for all 2000–2015: Achievements and challenges*. UNESCO.
- UNESCO. (2020). *Global education monitoring report 2020: Inclusion and education – All means all*. UNESCO.
- World Bank. (2018). *World development report 2018: Learning to realize education's promise*. World Bank.

PROFIL PENULIS




Melati Indri Hapsari, S.KM, M.Kes.

Penulis merupakan seorang profesional di bidang pendidikan yang telah mengabdikan diri sejak tahun 2001. Berbekal pengalaman panjang dalam dunia akademik dan praktik pendidikan, penulis memulai karier sebagai pendidik (pamong belajar pada pendidikan nonformal) dan terus berkembang hingga menjadi dosen di perguruan tinggi. Dalam perannya sebagai pendidik, penulis aktif mengajar, membimbing, mendampingi serta terlibat dalam berbagai kegiatan penelitian terutama *research and development* di bidang pendidikan.

Selain itu, penulis juga berkiprah sebagai aparatur di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sebagai jabatan fungsional Widyaprada pada Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Jawa Tengah yang mempunyai tugas melakukan penjaminan mutu pendidikan. Pengalaman ini memperkaya wawasan penulis dalam mengintegrasikan teori dan praktik pendidikan secara komprehensif. Penulis memiliki minat khusus pada inovasi pembelajaran, digitalisasi pendidikan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang pendidikan. Dedikasi dan komitmen yang tinggi menjadikan penulis terus berkontribusi dalam memajukan sistem pendidikan di Indonesia secara berkelanjutan.

Email Penulis: melatikesling06@gmail.com



BAB 7

KOHESI KEBIJAKAN

DALAM REFORMASI

PENDIDIKAN

MENENGAH INDONESIA

(2003–2025)

Andarusni Alfansyur, S.Pd., M.Pd.
Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan



Pendahuluan

Reformasi kebijakan sektor pendidikan menengah di Indonesia sejak awal abad ke-21 telah menjadi fokus utama dalam upaya meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan nasional. Sejak era reformasi setelah 1998, berbagai rezim kebijakan bergantian memperkenalkan *framework*, instrumen, dan prioritas kebijakan yang berbeda, termasuk perubahan orientasi kurikulum, kebijakan pembiayaan, sistem penilaian, serta mekanisme tata kelola pendidikan. Transformasi tersebut mencerminkan respons terhadap tantangan domestik dan tuntutan global, seperti kebutuhan akan kompetensi abad 21 dan standar pendidikan internasional (Hajiri, 2025).

Dalam konteks ini, muncul pertanyaan penting tentang kohesi kebijakan (*policy coherence*) yang mengacu pada derajat keterpaduan, konsistensi, dan keselarasan antar instrumen kebijakan dalam mencapai tujuan reformasi pendidikan menengah. Kohesi kebijakan menjadi krusial mengingat *policy churn* yaitu perubahan kebijakan yang cepat dan sering, dapat memicu inkonsistensi implementasi dan menghambat pencapaian hasil pendidikan yang diharapkan. Fenomena ini tercatat dalam dinamika pergantian kurikulum, pergantian nomenklatur program, dan respons terhadap prioritas politik yang berbeda dari satu rezim ke rezim lainnya, yang berdampak pada persepsi pemangku kepentingan terhadap kesinambungan dan stabilitas kebijakan pendidikan (Napitupulu, 2025).

Studi-studi terdahulu menekankan bahwa konsistensi dan keselarasan kebijakan sangat berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan reformasi pendidikan. Misalnya, (Widiastuti, 2025) dalam tinjauan kebijakan pendidikan nasional menunjukkan tantangan dalam menjaga kesinambungan kebijakan sebagai *prasyarat* untuk menjamin pencapaian tujuan pendidikan yang berkelanjutan. Demikian pula, kajian literatur oleh (Kusuma, Hamidah, Umalihayati, & Rini, 2024) menunjukkan bahwa perubahan kebijakan seperti perluasan wajib belajar, revisi kurikulum, dan program bantuan pendidikan memiliki dampak kompleks terhadap akses serta kualitas pembelajaran jika tidak diimbangi dengan kohesi inter-instrumen kebijakan.

Konsep *policy coherence* dalam pendidikan tidak hanya mencakup konsistensi temporal (keterpaduan antar periode kebijakan), tetapi juga keterpaduan lintas tingkatan pemerintahan (*vertical coherence*) serta antara tujuan, strategi, dan alat pelaksanaan (*horizontal coherence*). Ketidakseimbangan antar instrumen misalnya antara pembiayaan dan sistem penilaian atau antara struktur kurikulum dan tata kelola sekolah dapat menghasilkan distorsi dalam implementasi kebijakan yang akhirnya memengaruhi hasil pendidikan di tingkat provinsi (Hajiri, 2025).

Mengingat sifat desentralisasi pendidikan di Indonesia dan variasi kondisi sosial-ekonomi antar daerah, perdebatan tentang hubungan antara *policy coherence* dan *outcomes* pendidikan juga semakin penting. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa provinsi yang memiliki keselarasan kebijakan yang lebih baik cenderung menunjukkan hasil belajar yang lebih tinggi, sedangkan provinsi dengan kohesi kebijakan yang rendah sering menghadapi disparitas hasil belajar yang lebih tajam (Napitupulu, 2025).

Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk menguraikan. Pertama, perkembangan historis reformasi kebijakan pendidikan menengah di Indonesia dari tahun 2003 hingga 2025. Kedua, mengevaluasi tingkat kohesi antar instrumen kebijakan utama (kurikulum, pembiayaan, penilaian, tata kelola). Ketiga, mengukur hubungan antara tingkat keselarasan kebijakan dan hasil pendidikan di berbagai provinsi. Temuan diharapkan dapat memberikan perspektif empiris dan konseptual mengenai peran kohesi kebijakan dalam meningkatkan efektivitas reformasi pendidikan menengah untuk pencapaian tujuan nasional.

Evolusi Reformasi Pendidikan Menengah dan Dinamika Rezim Kebijakan (2003–2025)

Reformasi pendidikan menengah di Indonesia sejak awal 2000-an berkembang dalam konteks desentralisasi fiskal dan administratif yang diperkuat melalui Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003. Periode 2003–2025 memperlihatkan beberapa fase kebijakan yang merefleksikan perubahan orientasi rezim, baik dari sisi paradigma kurikulum, sistem evaluasi, maupun tata kelola pendidikan.

Daftar Pustaka

- Badan Standar Nasional Pendidikan. (2006). *Standar Nasional Pendidikan*. Jakarta: BSNP.
- Gary S. Becker. (1993). *Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education* (3rd ed.). Chicago: The University of Chicago Press.
- Hajiri. (2025). Analisis kohesi kebijakan pendidikan di Indonesia dalam perspektif desentralisasi. *Jurnal Kebijakan Pendidikan Indonesia*, 12(1), 1–15.
- Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. (2025). *Laporan Program Digitalisasi Pembelajaran*. Jakarta: Kemendikdasmen.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. (2022). *Hasil Asesmen Nasional 2022*. Jakarta: Kemendikbudristek.
- Kusuma, A., Hamidah, S., Umalihatyati, R., & Rini, D. (2024). Dinamika kebijakan pendidikan dan dampaknya terhadap akses dan kualitas pendidikan di Indonesia. *Jurnal Pendidikan dan Kebijakan Publik*, 11(2), 78–95.
- Napitupulu. (2025). Policy churn dan dampaknya terhadap stabilitas reformasi pendidikan nasional. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 9(2), 45–60.
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2016). *Better Policies for Sustainable Development 2016: A New Framework for Policy coherence*. Paris: OECD Publishing.
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2019). *PISA 2018 Results (Volume I): What Students Know and Can Do*. Paris: OECD Publishing.
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2020). *Policy coherence for Sustainable Development 2020*. Paris: OECD Publishing.
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2022). *PISA 2022 Results (Volume I): The State of Learning and*

Equity in Education. Paris: OECD Publishing.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. (2003). Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.

Widiastuti. (2025). Konsistensi kebijakan pendidikan dan implikasinya terhadap mutu pembelajaran. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 14(1), 23–37.

World Bank. (2020). *Indonesia Public Expenditure Review: Spending for Better Results*. Washington, DC: World Bank.

World Bank. (2023). *Indonesia Education Public Expenditure Review Update*. Washington, DC: World Bank.

PROFIL PENULIS




Andarusni Alfansyur, S.Pd., M.Pd.

Penulis adalah seorang praktisi dan akademisi pendidikan yang memiliki visi besar terhadap transformasi kualitas pembelajaran di Indonesia. Ketertarikan penulis terhadap Ilmu Pendidikan dimulai pada tahun 2010 silam. Hal tersebut membuat penulis memilih untuk masuk ke Universitas Sriwijaya (S1) Program Studi Pend. Pancasila dan Kewarganegaraan pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi dan berhasil menyelesaikan studi S2 di Program Studi Manajemen Pendidikan Islam di UIN Raden Fatah Palembang pada tahun 2020. Lalu, penulis melanjutkan studi S3 di Program Pascasarjana Program Studi Manajemen Kependidikan Unnes.

Selain aktif di dunia akademik, penulis juga mengabdikan diri di unit kerja MAN 3 Kota Palembang. Peran strategisnya dalam manajemen pimpinan dalam institusi memberinya perspektif unik dalam menjembatani teori-teori pedagogi kritis dan praktiknya dalam dunia pendidikan


Sebagai praktisi yang menaruh perhatian besar pada kemajuan pendidikan, penulis telah berprestasi pada berbagai forum kompetisi manajemen dan inovasi pendidikan di tingkat nasional maupun internasional. Pengalaman tersebut penulis transformasikan ke dalam pengembangan program strategis sekolah serta perancangan media pembelajaran.

Email Penulis: andarusnialfansyur@students.unnes.ac.id



BAB 8
IMPLEMENTASI
KEBIJAKAN
PENDIDIKAN VOKASI
DAN REVITALISASI SMK
DI INDONESIA

Nofel Windo, S.Si., M.M.
Universitas Negeri Semarang



Urgensi Strategis Pendidikan Vokasi

Visi Indonesia Emas 2045 menempatkan Indonesia sebagai salah satu kekuatan ekonomi terbesar dunia, sebuah cita-cita yang sangat bergantung pada optimalisasi bonus demografi yang tengah berlangsung. Fenomena ini, yang ditandai dengan dominasi penduduk usia produktif, merupakan jendela peluang strategis (*window of opportunity*) yang hanya akan memberikan manfaat ekonomi jika dibarengi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang kompetitif. Tanpa transformasi kualitas tenaga kerja, Indonesia berisiko terjebak dalam perangkap pendapatan menengah (*middle-income trap*) dan gagal mengonversi keunggulan kuantitas penduduk menjadi keunggulan produktivitas nasional.

Pendidikan vokasi menempati posisi yang sangat strategis dalam konstelasi pembangunan ekonomi nasional, mengingat fungsinya yang fundamental dalam mengonstruksi tenaga kerja terampil yang memiliki kompetensi spesifik sesuai dengan dinamika kebutuhan sektor industri. Dalam lanskap pendidikan di Indonesia, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) merupakan entitas instruksional yang secara desain kurikulum dan kelembagaan dipersiapkan untuk mencetak para lulusan yang memiliki kesiapan penuh untuk bertransisi ke dalam lingkungan kerja profesional (OECD, 2021).

Kendati secara konseptual telah dirancang sedemikian rupa, berbagai data empiris memberikan gambaran yang cukup kontradiktif, di mana prevalensi pengangguran pada segmen lulusan SMK masih memperlihatkan angka yang relatif signifikan jika dikomparasikan dengan lulusan dari jenjang pendidikan lainnya. Berdasarkan rilis data resmi dari Badan Pusat Statistik, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) bagi lulusan jenjang SMK secara ajek dan konsisten menempati urutan grafik tertinggi dibandingkan dengan output dari strata pendidikan lainnya (BPS, 2025). Disparitas statistik ini mengindikasikan adanya celah atau *mismatch* yang mendalam antara kualifikasi kompetensi yang dihasilkan institusi pendidikan dengan profil kualifikasi yang diekspektasikan oleh dunia kerja saat ini.

Sebagai langkah konkret dalam mengintervensi kompleksitas permasalahan tersebut, Pemerintah Indonesia melalui kementerian terkait mengartikulasikan kebijakan revitalisasi SMK yang berorientasi pada penguatan relevansi pendidikan vokasi terhadap kebutuhan nyata sektor industri (Kemendikbudristek, 2023). Arsitektur kebijakan ini bersifat holistik dan mencakup berbagai pilar krusial, mulai dari reorientasi kurikulum yang berlandaskan standar industri, eskalasi kapasitas dan pedagogi profesional guru, hingga penguatan sinergisitas kemitraan dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI), serta modernisasi infrastruktur fasilitas praktik yang selaras dengan standar operasional industri modern. Namun, dalam tataran operasional, implementasi strategi ini masih kerap terbentur oleh pelbagai tantangan birokratis dan teknis di lingkungan sekolah. Oleh karena itu, kajian mendalam mengenai implementasi kebijakan revitalisasi SMK menjadi sangat krusial guna membedah sejauh mana intervensi regulasi tersebut mampu memberikan solusi substantif terhadap problematik pendidikan vokasi di Indonesia.

Arah dan Desain Kebijakan Vokasi

Kebijakan pendidikan pada dasarnya merupakan sebuah instrumen strategis yang bersifat krusial dalam menentukan arah kebijakan, kualitas, serta orientasi masa depan sistem pendidikan di suatu negara. Tilaar & Nugroho (2008) memberikan konseptualisasi bahwa kebijakan pendidikan adalah suatu formulasi yang bersifat komprehensif mengenai pelbagai metodologi dalam menjawab tantangan pendidikan, sekaligus berfungsi sebagai alat manajerial untuk mencapai visi pendidikan nasional. Di sisi lain, perspektif yang ditawarkan oleh Dye (2013) menyebutkan bahwa kebijakan merupakan representasi dari pilihan pemerintah untuk mengeksekusi sebuah tindakan atau justru memilih untuk tidak melakukan tindakan tertentu. Dalam konteks diskursus pendidikan, apabila otoritas pemerintah mengambil pilihan untuk tidak memberikan subsidi atau tidak menggratiskan biaya operasional sekolah, maka sikap pasif atau "diamnya" pemerintah tersebut secara teknokratis tetap dikategorikan sebagai sebuah produk kebijakan pendidikan.

Daftar Pustaka

- Avana, N., Siska, N., Rurisman, A., Nurhizrah, G., & Rusdinal. (2024). Analisis kebijakan pendidikan terkait implementasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi. *Naturalistic: Jurnal Kajian Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran*, 8(2), 1145–1152. <https://journal.umtas.ac.id/naturalistic/article/view/3559/2081>
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Keadaan ketenagakerjaan Indonesia*. BPS RI.
- Badan Pusat Statistik. (2025). *Keadaan ketenagakerjaan Indonesia*. BPS RI.
- Becker, G. S. (1993). *Human capital: A theoretical and empirical analysis with special reference to education* (3rd ed.). University of Chicago Press. <https://doi.org/10.7208/chicago/9780226041223.001.0001>
- Dye, T. R. (2013). *Understanding public policy*. Pearson Education.
- Fattah, N. (2012). *Analisis kebijakan pendidikan*. Remaja Rosdakarya.
- Imron, A. (1996). *Kebijaksanaan pendidikan di Indonesia: Proses, produk, dan masa depannya*. Bumi Aksara.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2023). *Revitalisasi pendidikan vokasi di Indonesia*. Kemendikbudristek.
- Maulana, A. (2023). Optimalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi di Indonesia. *Jurnal Pembangunan dan Administrasi Publik*, 5(1), 1–15. [Tambahkan link jika ada]
- OECD. (2021). *Vocational education and training in Indonesia: Strengthening skills for the future*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/0b1f5b6d-en>
- Suharno, S., Pambudi, N. A., & Harjanto, B. (2020). Vocational education in Indonesia: History, development, opportunities, and challenges. *Children and Youth Services Review*, 115, 105092. <https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2020.105092>
- Tilaar, H. A. R., & Nugroho, R. (2008). *Kebijakan pendidikan: Pengantar untuk memahami kebijakan pendidikan sebagai kebijakan publik*. Pustaka Pelajar.

UNESCO. (2020). *Technical and vocational education and training strategy 2020–2025*. <https://doi.org/10.54675/TVET2020>

World Bank. (2022). *Improving workforce skills in Indonesia*. World Bank Publications. <https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1900-5>


PROFIL PENULIS



Nofel Windo, S.Si, M.M.

Penulis dikenal luas sebagai seorang Spiritual Motivator. Beliau merupakan Master Trainer dan Asesor tersertifikasi BNSP RI, Profesional Coach dan Konsultan di bidang pengembangan SDM, Pendidikan Karakter, Kepemimpinan dan Budaya Organisasi, yang telah berpengalaman selama lebih dari 20 Tahun, dan memandu lebih dari 1.000 kelas pelatihan di Indonesia dan Mancanegara. Pendiri sekaligus CEO dari Lembaga Novelty Training and Consulting (NTC) ini memiliki motto hidup “Never stop to Contribute”. Pendidikan S1 beliau di bidang Bioteknologi di Universitas Al Azhar Indonesia, kemudian melanjutkan Pendidikan S2 di Magister Manajemen Universitas Teknologi Yogyakarta. Kesungguhan penulis dalam upaya memajukan Pendidikan di Indonesia ditunjukkan dengan Keputusan melanjutkan Pendidikan doctoral di bidang manajemen Pendidikan di Universitas Negeri Semarang. Selama ini, penulis mendedikasikan hidupnya untuk menginspirasi dan memotivasi banyak orang melalui kelas-kelas pelatihan, baik offline maupun online termasuk melalui media sosial dengan konten-konten yang khas, powerful dan meaningful. Sebelumnya penulis juga telah menghasilkan dua karya buku yaitu buku pertama berjudul “Tenang Jiwa Semangat Menyala”, dan buku kedua berjudul “Powerupyourdays”. Semoga tersebar manfaat kepada sebanyak-banyaknya pembaca.

Silakan kunjungi beliau di media sosial Instagram @nofelwindo



BAB 9

IMPLEMENTASI

KEBIJAKAN

PEMBANGUNAN

PENDIDIKAN NON

FORMAL DI INDONESIA

Muta'alimah, S.Ag., M.S.I
Universitas Negeri Semarang



Pendahuluan

Sebagaimana diketahui bahwa Pendidikan di Indonesia ada tiga jenis, yaitu Pendidikan Formal, Pendidikan Nonformal, dan Pendidikan Informal. Kali ini akan dikaji tentang Pendidikan Nonformal. Implementasi kebijakan pembangunan Pendidikan Nonformal tertera dalam Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2021 (sebagaimana diubah menjadi PP No. 4 Tahun 22) Tentang standar mutu Pendidikan Nonformal, termasuk kurikulum, evaluasi, dan akreditasi).

Peran Pendidikan Nonformal juga tidak kalah penting dengan Pendidikan Formal di sekolah/ madrasah. Sebagaimana amanat Pendidikan Nasional yang tertera dalam UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2023 Pasal 3, tujuan Pendidikan Nasional adalah “Berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab.” Peran Pendidikan Nonformal terutama menitikberatkan pada aspek cakap, kreatif, dan mandiri, selain memiliki peran yang lainnya.

Banyak jenis Pendidikan Nonformal yang ditawarkan seperti Lembaga Kursus dan Pelatihan (LPK), Kelompok Belajar (Kejar), Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM), Majelis Taklim, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Bimbingan Belajar (Bimbel), dan Satuan Pendidikan Sejenis (SPS) sangar seni, padepokan pencak silat, sanggar tari, dan yang sejenisnya. Semuanya membutuhkan pengelolaan dan mutu penerapan (*quality implementation*) yang jelas, berkualitas, dan biaya yang terjangkau.

Persaingan Lembaga-Lembaga Nonformal semakin kentara, yang sudah memiliki nama memasang tarif yang hanya golongan menengah ke atas yang bisa terjangkau. Kenyataan yang Pendidikan Nonformal yang berkembang saat ini tidak semuanya dikelola

dan diterapkan dengan baik, dalam arti jelas, berkualitas, dan biaya yang terjangkau. Oleh karena diperlukan suatu usaha untuk meningkatkan pengelolaan lembaga-lembaga tersebut agar kehadirannya dapat dirasakan manfaatnya di tengah-tengah gejolak isu-isu pendidikan. Salah satu caranya adalah merumuskan kembali langkah-langkah implementasi kebijakan pembangunan Pendidikan Nonformal.

Pengertian dan Eksistensi Pendidikan Nonformal

Menurut Hamojoyo, Pendidikan nonformal adalah usaha yang terorganisir secara otomatis dan kontinyu di luar sistem persekolahan, melalui hubungan sosial untuk membimbing individu, kelompok, dan masyarakat agar memiliki sikap dan cita-cita sosial (yang efektif) guna meningkatkan taraf hidup di bidang materiil, sosial dan mental dalam rangka usaha mewujudkan kesejahteraan sosial (Mustafa Kamil, 2009:14). Hal ini senada dengan pengertian dari SAMEO (*South East Asean Ministry of Education Organization*), bahwa "Pendidikan non formal didefinisikan sebagai setiap kegiatan pendidikan yang diorganisir dan berkelanjutan yang tidak berkaitan secara tepat pada definisi pendidikan formal" (UNESCO, 1997:41).

Menurut Djudju Sudjana, salah satu pakar pendidikan luar sekolah di Indonesia, pendidikan non formal adalah: "Setiap upaya pendidikan dalam arti luas yang di dalamnya terdapat komunikasi yang teratur serta terarah dan diselenggarakan di luar sekolah, sehingga seseorang atau sebuah kelompok memperoleh informasi, latihan, dan bimbingan sesuai dengan tingkatan usia dan kebutuhan hidupnya" (Sudjana, 2004:46).

Dari beberapa pengertian di atas, Pendidikan Nonformal adalah Jalur pendidikan terstruktur di luar sistem formal (sekolah/kuliah) yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, atau pelengkap pendidikan formal untuk mengembangkan potensi, pengetahuan, keterampilan fungsional, dan sikap peserta didik. Tujuannya adalah memperluas akses pendidikan, meningkatkan taraf hidup melalui keterampilan kerja, serta mewujudkan pembelajaran sepanjang hayat (*AI Overview*). Jadi Pendidikan ini terorganisir untuk memenuhi kebutuhan belajar yang mungkin di Pendidikan Formal belum/kurang didapatkan, dalam rangka untuk meningkatkan taraf hidup manusia.

Eksistensi Pendidikan Nonformal tercantum dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) No. 20 Tahun 2003, pendidikan nonformal diakui sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal, yaitu Pasal 26: Menjelaskan bahwa

Daftar Pustaka

- Danim, S. (2010). *Pedagogi, Andragogi, dan Heutagogi*. Bandung: Alfabeta.
- Dye, T. R. (2017). *Understanding Public Policy*. Pearson.
- Hill, M., & Hupe, P. (2014). *Implementing Public Policy*. Sage.
- Ishak, S. (2018). Manajemen Implementasi Kebijakan Pendidikan Nonformal. *Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*.
- Judijanto, L. (2025). Tinjauan Bibliometrik Reproduksi Kultural pada Pendidikan Nonformal Masyarakat Lokal. *Sanskara Ilmu Sosial dan Humaniora (SISH)*, 3(01).
<https://doi.org/10.58812/sish.v3i01.712>
- Kamil, M. (2011). *Pendidikan Nonformal: Pengembangan Melalui Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) di Indonesia (Sebuah Pembelajaran dari Kominkan Jepang)*. Bandung: Alfabeta.
- Kamil, M. (2012). *Model Pendidikan dan Pelatihan (Konsep dan Aplikasi)*. Bandung: Alfabeta.
- Laila, D. A., dkk. (2021). Pemberdayaan masyarakat Indonesia melalui pendidikan nonformal: Sebuah kajian Pustaka. *Jurnal Pembangunan Pendidikan*, 9(2).
- Marks, B. A., & Heller, T. (2003). Bridging the equity gap: Health promotion for adults with intellectual and developmental disabilities. *Nursing Clinics of North America*, 38(2), 205–228.
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- Permendikbudristek Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah.
- Posti-Ahokas, H., & Okkolin, M.-A. (2016). Enabling and constraining family: Young women building their educational paths in Tanzania. *Community, Work & Family*, 19(3), 322–339.
<https://doi.org/10.1080/13668803.2015.1047737>

- Sihombing, U. (2001). *Pendidikan Luar Sekolah Kini dan Tantangan ke Depan*. Jakarta: PD Mahkota.
- Sudjana, D. (2004). *Pendidikan Nonformal: Wawasan, Sejarah Perkembangan, Filsafat, Teori, Pendukung, Asas*. Bandung: Falah Production.
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Yani, A. (2023a). Implementasi Program Merdeka Belajar terhadap Motivasi Belajar Peserta Didik dalam Perspektif Pendidikan Non Formal. *Transformasi: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Non Formal Informal*, 8(2), 62–75. <https://doi.org/10.33394/jtni.v8i2.6958>
- Yani, A. (2023b). Peran Pendidikan Non Formal Dalam Implementasi Program Merdeka Belajar Ada Warga Belajar Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Lombok Timur. *Jurnal Pendidikan Reform Sosial Budaya*, 6(1). <https://doi.org/10.70004/reform.v6i01.119>

PROFIL PENULIS



Muta'alimah, S.Ag., M.S.I.

Riwayat Pendidikan penulis SDN, SMPN, SMA Islam Jurusan A2 (Biologi), S1 Fakultas Tarbiyah IAIN, S2 Studi Islam(PAI) IAIN, dan sekarang sedang menempuh Pendidikan Program Doktorat (S3) Prodi Manajemen Kependidikan di Universitas Negeri Semarang (UNNES). S1 dan S2 diselesaikan di IAIN Walisongo Semarang. Ketertarikan penulis terhadap


menulis modul/buku ajar dimulai sejak menjadi guru di MTs. Tulisan penulis banyak tentang Pendidikan Islam, di samping Pendidikan umum. Sehingga sampai sekarang karya penulis yang sudah terbit antara lain:

1. "Cara Mudah Belajar Akidah Akhlak di Madrasah Tsanawiyah", Muta'alimah, Akfi Media: Semarang, 2011.
2. "Membangun Karakter Bangsa Melalui Akidah dan Akhlak", Muta'alimah, Rafi Sarana Perkasa: Semarang, 2014.
3. "Ayo Memahami Akidah dan Akhlak Kelas VII MTs", Muta'alimah, Erlangga: Jakarta, 2016.
4. "Ayo Memahami Akidah dan Akhlak Kelas VIII MTs", Muta'alimah, Erlangga: Jakarta, 2017.
5. "Ayo Memahami Akidah dan Akhlak Kelas IX MTs", Muta'alimah, Erlangga: Jakarta, 2018.
6. "Ayo Memahami Akidah dan Akhlak Kelas VII MTs", Muta'alimah, Erlangga: Jakarta, 2019.
7. "Akidah Akhlak Kelas IX (Berdasarkan KMA No. 183), Muta'alimah, Kemenag RI: Jakarta, 2020.
8. "Ayo Mendalami Akidah dan Akhlak untuk MTs Kelas VIII" (Berdasarkan KMA No. 183), Muta'alimah, Erlangga: Jakarta, 2021.
9. "Ayo Mendalami Akidah dan Akhlak untuk MTs Kelas IX" (Berdasarkan KMA No. 183), Muta'alimah, Erlangga: Jakarta, 2021.

10. "Ayo Mendalami Akidah dan Akhlak untuk MTs Kelas VII", IKM (Berdasarkan SK Dirjen No. 3211 Tahun 2022), Muta'alimah, Erlangga: Jakarta, 2022.
11. "Ayo Mendalami Akidah dan Akhlak untuk MTs Kelas VIII", IKM (Berdasarkan SK Dirjen No. 3211 Tahun 2022), Muta'alimah, Erlangga: Jakarta, 2023.
12. "Ayo Mendalami Akidah dan Akhlak untuk MTs Kelas IX", IKM (Berdasarkan SK Dirjen No. 3211 Tahun 2022), Muta'alimah, Erlangga: Jakarta, 2023.
13. "Akidah dan Akhlak untuk MTs Kelas VII", IKM (Berdasarkan SK Dirjen No. 3302 Tahun 2024), Muta'alimah, Erlangga: Jakarta, 2024.

Selama menjadi guru, penulis pernah menjadi juara 1 guru teladan (berprestasi) tingkat Kota Semarang yang diselenggarakan oleh Kemenag Kota Semarang, tahun 2019. Jabatan tambahan selama menjadi guru pernah menjadi Wakil Kepala MTs Negeri 1 Kota Semarang sebagai Waka Humas. Sebelumnya pernah menjadi Waka Kurikulum di MTs Syaroful Millah Kota Semarang. Terhitung mulai tanggal 1 September 2024 penulis mendapat jabatan baru sebagai Pengawas Sekolah/Madrasah Ahli Madya Tingkat MTs Kota Semarang, dibawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia. Penulis memiliki harapan/keinginan akan selalu menulis modul/buku, jurnal, dan mengadakan penelitian selama ada kesempatan dengan tujuan ingin memberikan sumbangan pemikiran demi kemajuan dunia Pendidikan di Indonesia, terutama lewat penemuan-penemuan baru yang penulis dapatkan. Semoga Allah ridha.

Email Penulis: mutaalmah47@gmail.com



BAB 10

**EVALUASI IMPLEMENTASI
KEBIJAKAN PENDIDIKAN
YANG RAMAH ANAK,
RESPONSIF GENDER, DAN
INKLUSIF DISABILITAS DI
INDONESIA**

Hisan bin Abdul Halim, M. A Syariah
Sekolah Menengah Agama Irshadiah, Bagan Datuk, Malaysia



Pengertian Kebijakan Pendidikan Ramah Anak, Perempuan dan Disabilitas

Kebijakan pendidikan ramah anak, perempuan dan disabilitas merupakan suatu pendekatan dalam sistem pendidikan yang menekankan prinsip keadilan, inklusivitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam proses pendidikan. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh peserta didik, tanpa memandang latar belakang sosial, gender, maupun kondisi fisik dan mental, memiliki akses yang setara terhadap pendidikan yang berkualitas.

Secara konseptual, pendidikan ramah anak merujuk kepada lingkungan belajar yang aman, nyaman, bebas dari kekerasan, serta memberikan ruang partisipasi kepada peserta didik. Daryono et al. (2023) menjelaskan bahwa sekolah ramah anak bukan hanya tentang infrastruktur, tetapi juga budaya sekolah yang menghargai suara anak dan melindungi hak mereka secara menyeluruh.

Sementara itu, pendidikan responsif gender menekankan pentingnya menghapus bias dan diskriminasi berbasis gender dalam sistem pendidikan. Cameron (2023) menyatakan bahwa meskipun akses pendidikan antara laki-laki dan perempuan semakin setara, ketimpangan masih terjadi dalam aspek kualitas, kepemimpinan, dan representasi.

Dalam konteks disabilitas, pendidikan inklusif bertujuan untuk mengintegrasikan peserta didik berkebutuhan khusus ke dalam sistem pendidikan reguler dengan menyediakan dukungan yang sesuai. Khasanah (2018) menegaskan bahwa pendidikan inklusif tidak hanya berkaitan dengan akses, tetapi juga dengan penerimaan sosial dan kualitas pengalaman belajar.

Dengan demikian, kebijakan pendidikan ramah anak, perempuan, dan disabilitas merupakan pendekatan multidimensional yang mencakup aspek pedagogis, sosial, dan struktural dalam sistem pendidikan.

Ruang Lingkup Kebijakan Pendidikan Inklusif

Ruang lingkup kebijakan pendidikan ramah anak, perempuan dan disabilitas mencakup berbagai dimensi yang saling berkaitan dalam sistem pendidikan nasional. Kebijakan ini tidak hanya terbatas pada

aspek kurikulum, tetapi juga melibatkan tata kelola pendidikan, budaya sekolah, serta peran berbagai pemangku kepentingan.

Secara struktural, kebijakan ini meliputi penyediaan akses pendidikan yang merata bagi semua kelompok masyarakat. Hal ini termasuk penyediaan fasilitas yang ramah disabilitas, pengembangan kurikulum inklusif, serta pelatihan guru dalam menangani keberagaman peserta didik. Riswari (2022) menekankan bahwa keberhasilan pendidikan inklusif sangat bergantung pada kesiapan sistem pendidikan secara menyeluruh, termasuk manajemen sekolah dan dukungan kebijakan.

Dari sisi sosial, ruang lingkup kebijakan ini mencakup upaya perubahan budaya sekolah agar lebih inklusif dan tidak diskriminatif. UNICEF (2023) menunjukkan bahwa stigma terhadap disabilitas masih menjadi hambatan utama dalam implementasi pendidikan inklusif di Indonesia.

Selain itu, kebijakan ini juga mencakup penguatan sistem evaluasi dan monitoring yang mampu mengukur dampak kebijakan terhadap pengalaman belajar peserta didik. Rahayu (2025) menyatakan bahwa evaluasi kebijakan pendidikan di Indonesia masih cenderung berorientasi pada indikator administratif, bukan pada hasil nyata yang dirasakan oleh siswa.

Dengan demikian, ruang lingkup kebijakan pendidikan inklusif mencakup aspek struktural, kultural, dan evaluatif yang harus diintegrasikan secara sistemik.

Landasan Filosofis dan Teoretis Kebijakan Pendidikan Inklusif

Kebijakan pendidikan ramah anak, perempuan dan disabilitas memiliki landasan filosofis yang kuat, yang berakar pada prinsip keadilan sosial, kesetaraan, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Dalam perspektif global, pendidikan inklusif dipandang sebagai upaya transformasi sistem pendidikan untuk mengakomodasi keberagaman peserta didik (Slee, 2018).

Pendekatan pragmatisme dalam pendidikan menekankan bahwa pembelajaran harus relevan dengan kehidupan nyata dan kebutuhan

Daftar Pustaka

- Achmad, W. (2023). *Implications of inclusive education policy in guaranteeing the rights of children*. Al-Ishlah: Jurnal Pendidikan.
- Ainscow, M. (2020). Promoting inclusion and equity in education: Lessons from international experiences. *Nordic Journal of Studies in Educational Policy*, 6(1), 7–16.
- Anwar, C. (2025). *Evaluasi kebijakan pendidikan inklusif di Indonesia: Tinjauan pustaka dan hambatan implementasi*. Jurnal Evaluasi Pendidikan.
- Arifin, I. (2024). Inclusive education sebagai alternatif solusi mengatasi permasalahan sosial anak penyandang disabilitas. *Sosioedukasi*.
- Artiles, A. J., Kozleski, E., & Waitoller, F. R. (2011). Inclusive education: Examining equity on five continents. *Harvard Educational Review*, 81(4), 646–652.
- Cameron, L. (2023). Gender equality and development: Indonesia in a global perspective. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 59(3), 345–367.
- Daryono, D., Hardhienata, S., & Wati, R. R. (2023). Effectiveness of implementation of the child-friendly school program.
- Dyson, A., & Millward, A. (2000). *Schools and special needs: Issues of innovation and inclusion*. Routledge.
- Fauziyah, N. (2025). Evaluating inclusive education initiatives in Indonesia: From policy to practice. *Educational Policy Analysis Journal*.
- Florian, L., & Black-Hawkins, K. (2011). Exploring inclusive pedagogy. *Cambridge Journal of Education*, 41(4), 495–510.
- Iswanto, D. (2025). Implementasi kebijakan sekolah dasar inklusif di Kota Malang. *Jurnal Penelitian Kebijakan Pendidikan*.
- Khasanah, E. Z. (2018). Inclusive education in concepts, policies, and implementation. *Indonesian Journal of Disability Studies*, 5(2), 123–132.
- Mahmud, H., Djaafar, L., & Hamim, U. (2025). Implementation of child-friendly inclusive and healthy education policy at junior high school

- level. *Indonesian Journal of Inclusive Education Studies*.
- Miles, S., & Singal, N. (2010). The education for all and inclusive education debate. *International Journal of Inclusive Education*, 14(1), 1-15.
- Muafiah, E., & Suranto, S. (2025). Implementation and problems of education based on gender equality, disability, and social inclusion at schools in Indonesia. *Review of International Studies in Education*.
- Nowak, K., Kowalski, P., & Zielinska, A. (2024). Evaluating the outcomes of inclusive education policies for students with disabilities in Indonesian schools. *International Journal of Educational Evaluation and Policy Analysis*, 1(2).
- Rahayu, N. S. R. (2025). Kajian implementasi kebijakan peserta didik berkebutuhan khusus di Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan*.
- Rini, T. A. (2024). Students' perspectives on inclusive education in Indonesia. *International Journal of Educational Research Review*.
- Riswari, F. (2022). The management gaps toward inclusive education at higher education level in Indonesia. *Indonesian Journal of Disability Studies*, 9(1), 45-58.
- Slee, R. (2018). *Inclusive education isn't dead, it just smells funny*. Routledge.
- Sowiyah, S., & Perdana, R. (2021). Inclusive education in Indonesia: Teachers' perceptions.
- Tikly, L. (2016). Education and the new imperialism. *Comparative Education*, 52(3), 401-416.
- UNICEF Indonesia. (2023). *Key issues for children with disabilities in Indonesia*.
- Unterhalter, E. (2017). *Gender, education and global social justice*. Routledge.
- World Bank. (2024). *How Indonesia is including students with disabilities in school in rural Indonesia*.

PROFIL PENULIS



Hisan bin Abdul Halim, SMA Irshadiah.

Hisan bin Abdul Halim merupakan anak jati Bagan Datuk, Perak yang dikenali sebagai seorang pendidik, pentadbir pendidikan serta aktivis belia yang aktif dan berwawasan. Dengan keperibadian yang kritikal, praktikal serta sentiasa bersedia meneroka perkara baharu, beliau membawa pendekatan yang segar dalam dunia pendidikan Islam dan pengurusan institusi pendidikan.

Beliau merupakan graduan dalam bidang Syariah dari Universiti Sains Islam Malaysia (USIM), dan kini sedang melanjutkan pengajian di peringkat Doktor Falsafah (PhD) dalam bidang Manajemen Pendidikan di Universiti Negeri Semarang (UNNES), Indonesia. Perjalanan akademik ini mencerminkan komitmen beliau yang berterusan dalam memperkukuh kefahaman serta membangunkan sistem pendidikan yang lebih berkesan dan berteraskan nilai.

Dalam kerjaya profesional, beliau kini berkhidmat sebagai Penolong Kanan Pentadbiran dan Kurikulum di Sekolah Menengah Agama Irshadiah, di mana beliau memainkan peranan penting dalam merancang, menyelaraskan dan memperkasa sistem pentadbiran serta pelaksanaan kurikulum. Pengalaman beliau turut diperkaya dengan penglibatan sebagai pensyarah di Universiti Kuala Lumpur (UniKL), yang memberikan pendedahan luas dalam dunia pendidikan tinggi serta pembangunan pelajar.

Selain bidang akademik dan pentadbiran, beliau juga aktif dalam kepimpinan belia. Beliau merupakan Yang Dipertua Gabungan Pelajar Melayu Semenanjung (GPMS) Cawangan Bagan Datuk, sekaligus menunjukkan komitmen tinggi dalam pembangunan generasi muda. Di samping itu, beliau turut menyumbang dalam bidang sukan sebagai Jurulatih Memanah Negeri Perak, membuktikan keseimbangan antara pembangunan intelektual dan fizikal.

Bidang kepakaran beliau tertumpu kepada Pendidikan Islam dan Pentadbiran Pendidikan, dengan minat khusus terhadap usaha memperkukuh sistem pendidikan yang holistik, berkesan dan relevan dengan cabaran semasa. Melalui penulisan dan penglibatan aktif dalam masyarakat, beliau berhasrat untuk terus menyumbang kepada pembangunan ummah melalui pendidikan yang berkualiti dan berimpak tinggi.

Dengan gabungan pengalaman akademik, kepimpinan dan lapangan, beliau percaya bahwa pendidikan bukan sekadar proses penyampaian ilmu, tetapi merupakan medium penting dalam membentuk pemikiran, nilai dan masa depan masyarakat.

Email Penulis: hisanabdulhalim@gmail.com

DINAMIKA DAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN

Buku ini hadir sebagai upaya untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai perubahan, tantangan, serta arah kebijakan pendidikan di tengah arus globalisasi dan perkembangan zaman yang semakin dinamis. Pendidikan merupakan fondasi utama dalam membangun peradaban suatu bangsa. Namun, dalam perjalanannya, sistem pendidikan terus mengalami perubahan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti perkembangan teknologi, sosial budaya, ekonomi, dan politik. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai dinamika yang terjadi serta kebijakan yang diambil oleh pemerintah menjadi hal yang krusial bagi para pendidik, mahasiswa, praktisi pendidikan, dan pemangku kebijakan. Dalam buku ini, kami mengupas berbagai topik penting mulai dari: (1) Kebijakan Peningkatan Mutu Pendidikan di Indonesia; (2) Dampak Globalisasi Terhadap Reformasi Kebijakan Pendidikan di Indonesia; (3) Kebijakan Pengembangan Kurikulum Pada Era Global; (4) Sejarah Kebijakan Pendidikan Pada Era Orde Lama, Orde Baru dan Reformasi; (5) Rumusan Kebijakan Pengembangan Kualitas Dan Kompetensi Guru di Indonesia; (6) Implementasi Kebijakan Pengembangan Pendidikan Dasar di Indonesia; (7) Kohesi Kebijakan Dalam Reformasi Pendidikan Menengah Indonesia (2003–2025); (8) Implementasi Kebijakan Pendidikan Vokasi dan Revitalisasi SMK di Indonesia; (9) Implementasi Kebijakan Pembangunan Pendidikan Non Formal di Indonesia; (10) Evaluasi Implementasi Kebijakan Pendidikan yang Ramah Anak, Responsif Gender, dan Inklusif Disabilitas di Indonesia.